

ETIKA POLITIK M. NATSIR



Oleh :

A. Bachruddin
NIM. 09.31.737/S3

DISERTASI

**PROGRAM DOKTOR (S3) STUDI ISLAM
PASCASARJANA UIN SUNAN KALIJAGA**

**YOGYAKARTA
2018**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
PASCASARJANA

Jln. Marsda Adisucipto Yogyakarta, 55281 Telp. (0274) 519709 Fax (0274) 557978
e-mail: pps@uin-suka.ac.id. website: <http://pps.uin-suka.ac.id>

PENGESAHAN

Disertasi berjudul : ETIKA POLITIK M. NATSIR

Ditulis oleh : Drs. A. Bachruddin, M.Ag.

N I M : 09.31.737/S3

Program/Prodi. : Doktor (S3) / Studi Islam

**Telah dapat diterima
sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Doktor (Dr.)
dalam Bidang Studi Islam**

Yogyakarta, 12 Desember 2018

an. Rektor
Ketua Sidang,

Prof. Dr. H. Maragustam, MA.
NIP. 19591001 198703 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
PASCASARJANA

Jln. Marsda Adisucipto Yogyakarta, 55281 Telp. (0274) 519709 Fax (0274) 557978
e-mail: pps@uin-suka.ac.id. website: http://pps.uin-suka.ac.id

YUDISIUM

BISMILLĀHIRRAHMĀNIRRAHĪM

DENGAN MEMPERTIMBANGKAN JAWABAN PROMOVENDUS ATAS PERTANYAAN DAN KEBERATAN PARA PENGUJI DALAM UJIAN TERTUTUP PADA TANGGAL **26 JANUARI 2018**, DAN SETELAH MENDENGAR JAWABAN PROMOVENDUS ATAS PERTANYAAN DAN SANGGAHAN PARA PENGUJI DALAM UJIAN TERBUKA PROMOSI DOKTOR PADA HARI INI, MAKA KAMI MENYATAKAN, PROMOVENDUS **DRS. A. BACHRUDDIN, M.Ag.** NOMOR INDUK MAHASISWA **09.31.737/S3** LAHIR DI **SALATIGA** TANGGAL **23 DESEMBER 1953**,

LULUS DENGAN PREDIKAT :

PUJIAN (CUM LAUDE) / SANGAT MEMUASKAN / MEMUASKAN*

KEPADA SAUDARA DIBERIKAN GELAR DOKTOR DALAM BIDANG STUDI ISLAM DENGAN SEGALA HAK DAN KEWAJIBAN YANG MELEKAT ATAS GELAR TERSEBUT.

SAUDARA MERUPAKAN DOKTOR KE - 619

YOGYAKARTA, 12 DESEMBER 2018

**AN. REKTOR
KETUA SIDANG,**

PROF. DR. H. MARAGUSTAM, MA.
NIP. 19591001 198703 1 002

* CORET YANG TIDAK DIPERLUKAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
PASCASARJANA

Jln. Marsda Adisucipto Yogyakarta, 55281 Telp. (0274) 519709 Fax (0274) 557978
e-mail: pps@uin-suka.ac.id. website: http://pps.uin-suka.ac.id

DEWAN PENGUJI
UJIAN TERBUKA PROMOSI DOKTOR

Disertasi berjudul : ETIKA POLITIK M. NATSIR

Nama Promovenda : Drs. A. Bachruddin, M.Ag.
N I M : 09.31.737/S3

Ketua Sidang / Penguji : Prof. Dr. H. Maragustam, MA.

Sekretaris Sidang : Dr. Phil. Sahiron, MA.

Anggota : 1. Prof. Dr. H. Kaelan, MS.
(Promoto/Penguji)
2. Dr. Ahmad Yani Anshori, MA.
(Promoto/Penguji)
3. Dr. Moch. Nur Ichwan, MA.
(Penguji)
4. Prof. Dr. H. Siswanto Masruri, MA.
(Penguji)
5. Dra. Siti Syamsiatun, MA., Ph.D.
(Penguji)
6. Dr. Mochamad Sodik, M.Sos., M.Si.
(Penguji)

Diujikan di Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018

Waktu : Pukul 10.00 s/d selesai

Hasil / Nilai (IPK) : 3,26

Predikat Kelulusan : ~~Pujian (Cum Laude)~~ / Sangat Memuaskan / Memuaskan



PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : Drs. A. Bachruddin, M.Ag.
N I M : 09.31.737/S3
Program/Prodi. : Doktor (S3) / Studi Islam

menyatakan bahwa naskah **disertasi** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, September 2018

Saya yang menyatakan,



Drs. A. Bachruddin, M.Ag.
NIM. 09.31.737/S3



KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA

PENGESAHAN PROMOTOR

Promotor : Prof. Dr. H. Kaelan, MS.

Promotor : Dr. Ahmad Yani Anshori, MA.



NOTA DINAS

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

ETIKA POLITIK M. NATSIR

yang ditulis oleh:

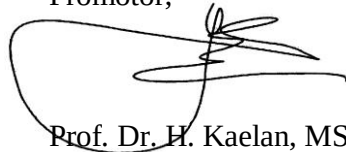
N a m a : Drs. A. Bachruddin, M.Ag.
N I M : 09.31.737/S3
Program/Prodi. : Doktor (S3) / Studi Islam

sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada 26 Januari 2018, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor Bidang Studi Islam.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 23 Juli 2018

Promotor,



Prof. Dr. H. Kaelan, MS.

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

ETIKA POLITIK M. NATSIR

yang ditulis oleh:

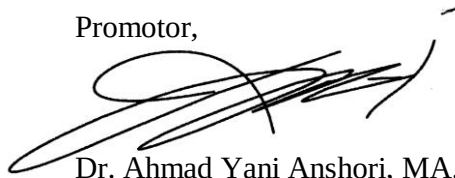
N a m a : Drs. A. Bachruddin, M.Ag.
N I M : 09.31.737/S3
Program/Prodi. : Doktor (S3) / Studi Islam

sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada 26 Januari 2018, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor Bidang Studi Islam.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 19 Juli 2018

Promotor,



Dr. Ahmad Yani Anshori, MA.

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

ETIKA POLITIK M. NATSIR

yang ditulis oleh:

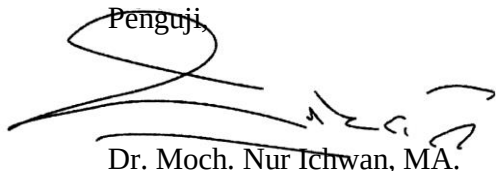
N a m a : Drs. A. Bachruddin, M.Ag.
N I M : 09.31.737/S3
Program/Prodi. : Doktor (S3) / Studi Islam

sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada 26 Januari 2018, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor Bidang Studi Islam.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 26 Juli 2018

Penguji



Dr. Moch. Nur Ichwan, MA.

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

ETIKA POLITIK M. NATSIR

yang ditulis oleh:

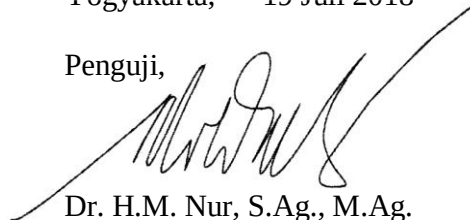
N a m a : Drs. A. Bachruddin, M.Ag.
N I M : 09.31.737/S3
Program/Prodi. : Doktor (S3) / Studi Islam

sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada 26 Januari 2018, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor Bidang Studi Islam.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 19 Juli 2018

Penguji,



Dr. H.M. Nur, S.Ag., M.Ag.

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

ETIKA POLITIK M. NATSIR

yang ditulis oleh:

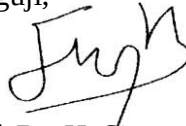
N a m a : Drs. A. Bachruddin, M.Ag.
N I M : 09.31.737/S3
Program/Prodi. : Doktor (S3) / Studi Islam

sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada 26 Januari 2018, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor Bidang Studi Islam.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 26 Juli 2018

Penguji,



Prof. Dr. H. Siswanto Masruri, MA.

ABSTRAK

Politik tentu saja tidak hanya sekedar ditempatkan sebagai proses untuk mendapatkan kekuasaan. Artinya bagaimanakah cara meraih kursi dan kedudukan ataupun jenjang kekuasaan setinggi mungkin dapat dilakukan dengan penuh keadaban, santun, sesuai dengan moralitas maupun akhlak ataupun etika, menjadi menjadi sesuatu sesuatu yang sangat mendasar, dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang bermartabat. Pemikiran dan perilaku politik senantiasa menarik minat untuk di kaji, hal itu karena politik termasuk permasalahan yang lazim ditemukan dalam bermasyarakat. Pada dasarnya, di manapun ada negara di situ pula ada politik. Penyebab utama terjadinya pertikaian dan perang saudara antar sesama umat manusia. Kehidupan politik seseorang pada umumnya digambarkan bahwa tidak mungkin untuk mencapai kedudukan tanpa melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji, begitulah pandangan secara umum, tidak ada politisi yang berhasil untuk tidak mengotori tangannya. Hal itu bukan berarti semua politisi tidak bermoral, melainkan bahwa kejujuran harus ditinggalkan di rumah kalau mereka mau mencapai sukses. Jadi meskipun ada politisi dengan pribadi yang jujur, namun kejujuran mereka parkir (tempatkan) di luar gedung permainan politik. Terkait dengan dengan persoalan tersebut, maka sejarah dan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari aktivitas dan peranan M. Natsir dalam bidang politik. Kontribusinya yang besar adalah gagasan dan manuvernya dalam memperjuangkan konsep “mosi integral Natsir” yang sampai hari ini masih dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia. Realitas tersebut menjadikan dia sebagai sosok tokoh dan pemikir yang menarik untuk dijadikan obyek studi dan penelitian dari berbagai pihak. Sehubungan permasalahan tersebut, maka penulis melakukan kajian dengan judul “ETIKA POLITIK M. NATSIR “ dengan fokus mengkaji pemikiran-pemikirannya tentang etika politik, faktor-faktor apa saja yang mendorong munculnya pemikiran tersebut, apakah kontribusinya, serta relevansinya dengan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Penelitian dalam disertasi ini menggunakan pendekatan sejarah intelektual ataupun sejarah pemikiran. Sejarah intelektual “ adalah studi tentang pikiran-pikiran masa lalu” (*the study of past thoughts*), penelitian tentang konsep, nilai, serta ciri-ciri yang melekat pada obyek penelitian.. Obyek penelitian dibedakan: obyek material adalah pemikiran M.

Natsir tentang etika politik, sedangkan obyek formal adalah sejarah pemikiran ataupun sejarah intelektual, karena sesuai dengan karakternya sebagai bagian dari sejarah. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi secara kongkret pemikirannya tentang etika politik, bahwa dalam berpolitik tidak hanya sekedar ditempatkan sebagai proses untuk meraih kekuasaan semata, namun harus dilakukan sesuai dengan moralitas ataupun etika politik, serta mendapatkan penjelasan tentang faktor-faktor apa saja yang mendorong munculnya pemikiran tersebut, termasuk kondisi sosial, politik, budaya dan pemikiran yang berkembang saat itu, juga kontribusinya dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara, sesuai dengan hak-haknya sebagai warga negara, dan relevansi pemikiran tersebut, dengan kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Hasil penelitian ini ditemukan, bahwa menurut M. Natsir etika politik merupakan landasan etis bagi kekuasaan berupa kebenaran yang bersumber pada agama, meskipun tidak secara mutlak, sedangkan faktor-faktor yang mendorong munculnya pemikiran tersebut, dilatarbelakangi oleh kondisi kehidupan sosial politik pada waktu itu, yakni rivalitas antara kelompok Islam dan kelompok Nasionalis Sekuler, menyangkut pemisahan negara dan agama yang terjadi sekitar tahun 1930-1940. Sebagai bentuk kontribusinya dapat diperhatikan keterlibatannya pada aktivitas politik dan perjuangannya, serta pemikirannya pada masa sebelum kemerdekaan sekitar pada awal tahun 1930- 1940. Pada masa Soekarno dan Soeharto, juga bisa dilihat keterlibatan dalam aktivitas politik dan perjuangan serta pemikirannya pada masa-masa itu. Apabila diperhatikan realitas pada masa-masa sebelum kemerdekaan, maupun setelah kemerdekaan dengan mencermati aktifitas, serta kontribusinya pada masa-masa itu, maka terdapat keterkaitan di antara keduanya. Sehingga menjadikan penelitian ini masih relevan dengan kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

ABSTRACT

Politics does not merely deal with achieving a ruling position. This implies that to reach any level in any organization at any time, one must put civility, politeness, moral, and ethic forward to set a highly dignified nation. Political thoughts and behaviour always attract people to study as politics exists in every aspect of life in a society. It also underlies internal conflicts and wars. To most people, politics is described as a way to reach a desired position by doing whatever it takes. It does not mean, however, that politicians are immoral. There are, of course, honest, kind ones. But as a politician eagerly targets a position, he leaves his positive characters behind. In the history of Indonesia, M. Natsir played an important role in the world of Indonesian politics. His great ideas and manoeuvre proposing “Natsir integral motion” made him a figure attracting researchers to fulfil their curiosity. Being one of them, the author conducted a study entitled “M. Natsir’s Political Ethic (Etika Politik M. Natsir)” focusing on his thoughts towards political ethic, factors influencing his thoughts, his contributions, and its relevance to Indonesia as nation.

The study employed intellectual historical approach or the thought history. Intellectual history is the study of past thoughts, the study of concepts, values, and inherent characters of the object of study. Object of study was then split into two: material and formal. The former covered M. Natsir’s thoughts on political ethic, whereas the later embraced the history of thoughts or the history of intellectual. The aim of the study was to explore his ideas on political ethic, i.e. politics was not merely a process of achieving power but also an effort in applying moral or ethic. It also aimed to grab the supporting factors including the conditions of social, politics, culture, and emerging ideas at that time. Other goals were to acknowledge his contributions to the nation and their relevance to nationalism.

The results showed that M. Natsir thought that political ethic was an ethical base of power taken from religious rightness, whereas socio-politic situation at the time underlay his thoughts. Rivalry between Islam and secular nationalists

occurred from 1930 to 1940. His involvement in politics and fought and his ideas before independence era were his real contributions. In the era of Soekarno and Soeharto, he also involved actively. The relation his activities and contributions before and after independence make this study relevant to the recent condition in Indonesia.



ملخص البحث

السياسة لا توضع كعملية للحصول على السلطة، وهذا يعني أن كيفية تحقيق المقاعد والمواقف ومستويات السلطة العليا يمكن أن يتم مع الحضارة الكاملة والطيقة، وفقاً للأخلاق، لتصبح شيئاً أساسياً جداً في بناء الأمة الكريمة وحياة الدولة. يعد الفكر والسلوك السياسي أمراً مثيراً يجذب الاهتمام لبحثه، وذلك لأن السياسة تعتبر من القضايا السائدة في المجتمع. أينما توجد الدولة، فتوجد السياسة. والسياسة هو سبب رئيسي للنزاعات والحروب الأهلية بين بني البشر. إن الحياة السياسية للشخص عادة ما يتم وصفها من المستحيل أن يحصل على وظيفة دون ارتكاب أعمال سيئة، وهذا رأي سائد. ولكن لا يعني أن كل السياسيين لا يتحلون بالأخلاق الكريمة، غير أنهم يتركون الصدق في المنزل إذا كانوا يريدون تحقيق النجاح في الخارج. وعلى الرغم من أن هناك سياسي نزيه، إلا أنه وضع نزاهته خارج اللعبة السياسية. فيما يتعلق بهذه القضية، لا يمكن فصل تاريخ وتطور حياة الأمة والدولة في إندونيسيا عن أنشطة ودور محمد ناصر في المجال السياسي. إن مساهمتها الكبيرة هي فكرة وقدرة على المناورة في الكفاح من أجل مفهوم "طلب تكاملي ناصر" الذي لا يزال حتى يومنا هذا تتمتع بها الأمة كلها من إندونيسيا. هذا الواقع يجعله شخصية جذابة ومفكراً مثيراً ليكون موضوع دراسة وبحوث من مختلف الأطراف. وبناء على هذا قام الباحث بتقديم عنوان "أخلاقية السياسة عند ناصر" مركزاً على مراجعة أفكاره عن الأخلاق السياسية، ما هي العوامل التي تدفع ظهور هذه الفكرة، وما هي مساهماته، فضلاً عن أهميتها في حياة الأمة في إندونيسيا.

وتم تطبيق منهج التاريخ الفكري في هذا البحث، التاريخ الفكري هو دراسة الأفكار الماضية (*the study of past thoughts*)، ودراسة المفاهيم والقيم والخصائص المتأصلة في موضوع البحث. ينقسم موضوع البحث إلى قسمين؛ الأشياء المادية هي أفكار محمد ناصر حول الأخلاق السياسية، والأشياء الرسمية هي التاريخ الفكري، لأنها جزء من التاريخ. وكان الغرض من هذا البحث استكشاف فكرة محمد ناصر المحددة عن الأخلاق السياسية، على أن السياسة لا توضع كعملية للوصول إلى السلطة وحدها، بل يجب أن يتم ذلك وفقاً للأخلاق أو الأخلاق السياسية، كما رمى هذا البحث إلى شرح ما هي العوامل التي تقود ظهور هذه الفكرة، بما في ذلك الاجتماعية والسياسية والثقافية والفكرية

السائدة في ذلك الوقت، فضلا عن مساهمته في بناء الأمة والدولة، وفقا لحقوقه كمواطن،
وصلة هذه الأفكار مع حالة الأمة والدولة في إندونيسيا.

وأشارت نتائج البحث إلى أن الأخلاقيات السياسية عند مُجدناصر هو أساس
أخلاقي للسلطة في شكل الحقيقة التي تقوم على الدين، وإن لم تكن مطلقة. أما العوامل
التي تشجع على ظهور هذه الأفكار، فتكمن وراءها ظروف سياسية من الحياة الاجتماعية
في ذلك الوقت، وهما التنافس بين الجماعات الإسلامية والجماعات القومية العلمانية، فيما
يتعلق بفصل الدولة والدين الذي حدث في الفترة بين 1930 و 1940. ومن مساهماته هي
مشاركته في الأنشطة السياسية والنضال، وكذلك أفكاره حول عهد ما قبل الاستقلال
فببداية العام 1930-1940، ومشاركته أيضا في عصر سوكارنو وسوهارتو. إذا أمعنا النظر
في الأيام التي سبقت الاستقلال، أو بعد الاستقلال يتضح لنا أن أنشطة مُجد ناصر،
ومساهماته في تلك الفترة يرتبط بعضها بعضا، ولذا لا يزال هذا البحث ذا صلة لظروف
حياة الأمة والدولة في إندونيسيا.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB –LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543.b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Śā'	ś	es (dengan titik atas)
ج	Jīm	j	je
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Žāl	ž	zet (dengan titik atas)
ر	Rā'	r	er
ز	Zā'	z	zet
س	Sīn	s	es
ش	Syīn	sy	es dan ye
ص	Śād	ś	es (dengan titik bawah)
ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik bawah)
ط	Ṭā'	ṭ	te (dengan titik bawah)
ظ	Žā'	ž	zet (dengan titik bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Ghain	gh	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ل	Lām	l	el
م	Mīm	m	em
ن	Nūn	n	en
و	Wāw	w	we
هـ	Hā'	h	ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā'	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

Kata Arab	Ditulis
مَلَّةٌ مُتَعَدِّدَةٌ	<i>muddah muta'ddidah</i>
رَجُلٌ مُتَفَنِّنٌ مُتَعَيِّنٌ	<i>rajul mutafannin muta'ayyin</i>

C. Vokal Pendek

Ḥarakah	Ditulis	Kata Arab	Ditulis
Fatḥah	a	مَنْ نَصَرَ وَقَتَلَ	<i>man naṣar wa qatal</i>
Kasrah	i	كَمْ مِنْ فَتَاةٍ	<i>kamm min fi'ah</i>
Ḍammah	u	سُدُسٌ وَخُمْسٌ وَثُلُثٌ	<i>sudus wa khumus wa ṣulus</i>

D. Vokal Panjang

Ḥarakah	Ditulis	Kata Arab	Ditulis
Fatḥah	ā	فَتَّاحٌ رَزَّاقٌ مَنَّانٌ	<i>fattāḥ razzāq mannān</i>
Kasrah	ī	مَسْكِينٌ وَفَقِيرٌ	<i>miskīn wa faqīr</i>
Ḍammah	ū	دُخُولٌ وَخُرُوجٌ	<i>dukhūl wa khurūj</i>

E. Huruf Diftong

Kasus	Ditulis	Kata Arab	Ditulis
<i>Faṭḥah</i> bertemu <i>wāw</i> mati	aw	مولود	<i>maulūd</i>
<i>Faṭḥah</i> bertemu <i>yā'</i> mati	ai	مهيمن	<i>muḥaimin</i>

F. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata

Kata Arab	Ditulis
أأنتم	<i>a'antum</i>
أعدت للكافرين	<i>u'iddat li al-kāfirīn</i>
لئن شكرتم	<i>la'in syakartum</i>
إعانة الطالبين	<i>i'ānah at-tālibīn</i>

G. Huruf *Tā' Marbūṭah*

1. Bila dimatikan, ditulis dengan huruf “h”.

Kata Arab	Ditulis
زوجة جزیلة	<i>zaujah jazīlah</i>
جزية محّدة	<i>jizyah muḥaddadah</i>

Keterangan:

Ketentuan ini tidak berlaku terhadap kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali jika dikehendaki lafal aslinya.

Bila diikuti oleh kata sandang “*al-*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan “h”.

Kata Arab	Ditulis
تكملة المجموع	<i>takmilah al-majmū'</i>
حلاوة المحبة	<i>ḥalāwah al-maḥabbah</i>

2. Bila *tā' marbūṭah* hidup atau dengan *ḥarakah* (*fathah*, *kasrah*, atau *ḍammah*), maka ditulis dengan “*t*” berikut huruf vokal yang relevan.

Kata Arab	Ditulis
زكاة الفطر	<i>zakātu al-fiṭri</i>
إلى حضرة المصطفى	<i>ilā ḥaḍrati al-muṣṭafā</i>
جلالة العلماء	<i>jalālata al-‘ulamā’</i>

H. Kata Sandang *alif* dan *lām* atau “*al-*”

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah*:

Kata Arab	Ditulis
بحث المسائل	<i>baḥs al-masā’il</i>
المحصول للغزالي	<i>al-maḥṣūl li al-Ghazālī</i>

2. Bila diikuti huruf *syamsiyyah*, ditulis dengan menggandakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya serta menghilangkan huruf “*l*” (*el*)-nya.

Kata Arab	Ditulis
إعانة الطالبين	<i>i ‘ānah aṭ-ṭālibīn</i>
الرسالة للشافعي	<i>ar-risālah li asy-Syāfi‘ī</i>
شذرات الذهب	<i>syazarāt az-żahab</i>

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan ke hadirat Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang senantiasa melimpahkan rahmat kasih sayang dan hidayahNya sehingga penulisan disertasi ini dapat diselesaikan.

Secara personal maupun kelembagaan, banyak bantuan moril dan materil, berupa kebijakan, bimbingan, arahan, dan motivasi yang penulis dapatkan dari berbagai pihak. Kepada nama-nama dan pejabat di bawah ini, terima kasih yang tak terhingga saya haturkan kepada:

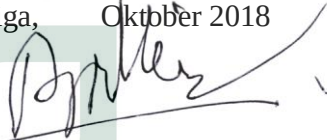
1. Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga, Prof. Noorhaidi, S.Ag., MA., M.Phil., Ph.D., selaku Direktur Pascasarjana, Dr. Moch Nur Ichwan, MA., selaku Wakil Direktur, Ahmad Rafiq, MA., Ph.D., selaku Ketua Program Studi Doktor, dan seluruh jajaran pengelola Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, disampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan yang diberikan kepada penulis atas bimbingan, arahan, bantuan, pemberian fasilitas, dan pelayanannya yang diberikan kepada penulis selama mengikuti proses perkuliahan, sampai terselesaikannya disertasi ini.
2. Prof. Dr. H. Kaelan, MS., dan Dr. Ahmad Yani Anshori, MA. selaku Promotor, yang dengan sabar, tekun, dan ulet memberikan bimbingan, telaah, arahan, masukan, dan koreksi dalam penulisan disertasi ini.
3. Dr. Moch. Nur Ichwan, MA., Dr. H.M. Nur, S.Ag., M.Ag., dan Prof. Dr. H. Siswanto Masruri, MA., selaku Penguji yang telah memberikan banyak masukan dan perbaikan demi kesempurnaan penulisan disertasi ini.
4. Rektor IAIN Salatiga, Dr. H. Rahmat Haryadi, M.Pd., Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora, atas motivasi dan dukungannya kepada penulis.
5. Dr. Imam Sutomo (Ketua STAIN Salatiga, periode 2006-2010, 2010-2014), dan Dr. Mubasirun yang senantiasa memberikan masukan dan koreksi selama penulisan disertasi ini.

6. Kedua orang tua penulis, H. Suyuti Abdullah (alm) Hj. Siti Khotijah (alm), semoga Allah SWT memberikan tempat yang terbaik disisi-Nya.
7. Segenap keluarga, Istriku (Tuti Cahyaningsih) dan anakku (Awaluddin Zakky, Fariza Azmi) yang tercinta, betapa kesabaran dan pengorbanan mereka, telah mengantarkan penyelesaian disetasi ini. Saudara-saudaraku, Abdullah Shodik (kakak), Basuki S.H., Dr. Ir. Agus Imron, M.S. (alm), Umi Kalsum, Nikmatul Hidayah dan Muh. Masykur (adik), yang telah memberikan dukungan secara terus menerus pada penulis
8. Teman-teman seperjuangan di Program Doktor Prodi Studi Islam angkatan 2009.

Semoga disertasi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat kasih sayang dan ampunan-Nya kepada para insan yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam proses penulisan disertasi ini.

Amien ya rabbul ‘alamin.

Salatiga, Oktober 2018



Drs. A. Bachruddin, M.Ag.
NIM. 09.31.737/S3

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Pengesahan Rektor	ii
Yudisium.....	iii
Dewan Penguji	iv
Pernyataan keaslian dan bebas Plagiarisme	v
Pengesahan Promotor	vi
Nota Dinas	vii
Abstrak.....	xii
Pedoman Transliterasi Arab-Latin	xviii
Kata Pengantar	xxii
Daftar Isi	xxiv

BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Kajian Pustaka	9
E. Kerangka Teori	14
1. Konsep tentang Etika	14
2. Konsep tentang Politik.....	21
3. Konsep tentang Etika Politik	29
F. Metode Penelitian	35
1. Jenis dan Pendekatan.....	35
2. Pembatasan dan Obyek Penelitian	38
3. Teknik Pengumpulan Data.....	38
4. Analisa.....	39
G. Sistematika.....	40

BAB II : BIOGRAFI M. NATSIR.....	43
A. Kehidupan M. Natsir	43
B. Aktivitas M. Natsir	49
1. Bidang Organisasi Sosial Keagamaan... 50	
a. M. Natsir dan Persis (Persatuan Islam)	50
b. M. Natsir dan DDII (Dewan Dakwah Islam Indonesia)	53
2. Bidang Politik	58
C. Karya-Karya M. Natsir.....	63

BAB III : KONDISI SOSIAL DAN POLITIK SEBELUM DAN SESUDAH KEMERDEKAAN	69
A. Kondisi Sosial dan Politik Sebelum Kemerdekaan (1920-1945).....	69
B. Kondisi Sosial dan Politik Pasca Kemerdekaan.....	74
1. Masa Pemerintahan Soekarno (1945-1965).....	75
2. Masa Pemerintahan Soeharto (1966-1998).....	83
 BAB IV : POKOK-POKOK PEMIKIRAN M. NATSIR	93
A. Karakteristik Pemikiran M. Natsir.....	93
B. Pemikiran Bidang Politik	108
1. Pemikiran tentang Dasar Negara	111
2. Pemikiran Tentang Demokrasi	132
3. Pemikiran tentang <i>Amar Ma'ruf Nahi Munkar</i>	150
C. Pemikiran Tentang Etika Politik	158
 BAB V : KONTRIBUSI DAN RELEVANSI PEMIKIRAN M. NATSIR TENTANG ETIKA POLITIK DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA DI INDONESIA.....	187
A. Sumbangan Pemikiran M. Natsir tentang Etika Politik Sebelum Kemerdekaan (1920-1945)	187
B. Sumbangan Pemikiran M. Natsir tentang Etika Politik Pasca Kemerdekaan.....	208
1. Masa Pemerintahan Soekarno (1945-1965).....	208
2. Masa Pemerintahan Soeharto (1966-1998).....	213
C. Relevansi Pemikiran M. Natsir dalam Kehidupan Berbangsa dan Benegara di Indonesia	223

BAB VI : PENUTUP.....	233
A. Kesimpulan.....	233
B. Saran.....	235
DAFTAR PUSTAKA.....	237
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Politik tidak hanya sekedar ditempatkan sebagai proses untuk mendapatkan kekuasaan belaka, artinya bagaimana cara meraih kursi dan kedudukan politik setinggi mungkin di jenjang kekuasaan. Akan tetapi proses untuk meraih kekuasaan itu dapat dilakukan dengan penuh keadaban, santun sesuai dengan moralitas maupun akhlak serta etika yang terpuji dan bermartabat menjadi sesuatu yang sangat mendasar.

Pemikiran dan perilaku politik senantiasa menarik minat untuk dikaji, hal itu karena politik termasuk permasalahan yang lazim ditemukan dalam bermasyarakat.¹ Pada dasarnya, dimanapun ada negara di situ pula ada politik.² Penyebab utama terjadinya pertikaian dan perang saudara antar sesama umat manusia.³ Kehidupan politik seseorang pada umumnya digambarkan bahwa tidak mungkin untuk mencapai kedudukan tanpa melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji, begitulah pandangan secara umum, tidak ada politisi yang berhasil untuk tidak mengotori tangannya. Hal itu bukan berarti semua politisi tidak bermoral, melainkan bahwa kejujuran harus ditinggalkan di rumah kalau mereka mau mencapai sukses. Jadi meskipun ada politisi dengan pribadi yang jujur, namun kejujuran mereka parkir (tempatkan) diluar

¹Persoalan politik atau persoalan yang berhubungan dengan negara terutama kekuasaan, muncul sebagai akibat yang tak terelakkan dari suatu keharusan umat manusia untuk hidup bermasyarakat. Lihat Abd ar-Rahman Ibnu Muhammad Ibnu Hasan Ibnu Ibrahim Ibnu Abdur Rahman Ibnu Khaldun, *Muqaddimah al-Musanna*, (Baghdad, t.t.), 34.

²Laslie Lipson, *The Great Issues of Politic on Introduction to Political*, (Berkley: University of California, 1997), 44-45.

³Tidak pernah terjadi sebilah pedang dihunus karena suatu persoalan dasar agama seperti yang terjadi karena persoalan imamah di setiap zaman. Muhammad Ibnu Abd al-Karim al-Syahrastani, *al-Milal wa al-Nihal*, edisi M.S Kailani, (Beirut: Dar al-Ma'arif, 1975), 24.

gedung permainan politik.⁴ Oleh karena itu menurut Ibnu Khaldun bahwa politik harus tetap mempunyai kaitan yang menentukan dengan ketinggian budi pekerti manusia. Moralitas dan kekuasaan pada dasarnya merupakan bagian yang saling terkait.⁵

Realitas politik di Indonesia pada kenyataannya merupakan pertarungan kekuatan. Kekerasan, politik uang dan korupsi mendominasi kehidupan politik di Indonesia. Seperti peristiwa tragis yang terjadi diwarnai kerusuhan disertai penjarahan, penganiayaan, pembunuhan dan pemerkosaan (Mei 1998). Kekerasan lebih kejam lagi terjadi dilatarbelakangi oleh perselisihan antar etnis dan antar agama (Pontianak, Sampit, Ambon dan Poso). Semua itu meninggalkan korban, trauma, pengungsian, penderitaan yang berkepanjangan. Kekerasan-kekeraan itu tidak muncul dengan sendirinya. Peristiwa-peristiwa tragis tersebut memiliki keterkaitan dengan kelompok tertentu.⁶

Masih berkaitan dengan persoalan di atas, kondisi kehidupan politik sekarang ini, kedudukan tidak sekedar diminta, tetapi dapat ditengarai seseorang bisa menggunakan segala cara dalam mencapai tujuannya. Untuk meraih tujuan tersebut, bila perlu dengan uang yang sering disebut *money politics*. Selain mendaftar juga melamar kepada partai politik tertentu, yang kira-kira dapat memuluskan jalan bagi yang bersangkutan untuk menduduki singgasana kekuasaan.⁷ Situasi dan kondisi tersebut, merupakan gambaran dari politik sekarang ini, yang diwarnai tindakan kekerasan yang hampir terjadi di seluruh wilayah tanah air, juga kasus korupsi yang

⁴Frans Magnis Suseno, *Filsafat Kebudayaan Politik*, (Jakarta: Gramedia Utama Pustaka, 1995), 114-115.

⁵Zainuddin, A. Rahman, *Kekuasaan Dan Negara*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), 139-140.

⁶Haryatmoko, *Etika Politik dan Kekuasaan*, (Jakarta: Kompas, 2009), IX.

⁷Rafiq Ahmad, *Fiqh Kontekstual*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 105-106.

merebak dan terjadi di kalangan pejabat baik di pusat maupun di daerah. Menurut catatan Kemendagri, selama periode 2004-2012 lebih dari 175 kepala daerah yang terdiri atas 17 gubernur dan 158 bupati/walikota menjalani pemeriksaan di KPK. Sebanyak 40 diantaranya sudah diproses secara hukum, bahkan telah mendekam di penjara.⁸

Sehubungan dengan persoalan tersebut, sejarah dan aktivitas M. Natsir pada bidang politik menjadi penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Dia dipercaya sebagai Ketua Umum di Partai Masyumi yang kemudian mengantarkannya duduk sebagai Perdana Menteri (1950-1951) pada era kepemimpinan presiden Soekarno. Meski pada akhirnya harus berpisah dengan Presiden pertama RI, karena perbedaan pandangan mengenai kebijakan Presiden yang saat itu menerapkan sistem “demokrasi terpimpin”.⁹ Kemudian tahun 1956-1958 menjadi Deputy Perdana Menteri Pemerintahan Revolusioner Indonesia (PRRI).¹⁰

Sejak muda, keterlibatan M. Natsir dalam berbagai polemik intelektual bidang keagamaan dan politik sudah dilakukan. Kiprahnya dalam kancah nasional maupun internasional, memiliki berbagai catatan aktivitas yang multivisi. Kepiawaiannya dalam berpolemik disertai kecekatannya menuangkan pemikiran, gagasan dan ide-idenya melalui tulisan di media massa. Gagasan dan pandangannya sudah sering dilontarkan sejak usia muda. Bahkan pada tahun 1930-an dia sudah sering menggunakan istilah modernisme politik Islam.

M. Natsir memandang perlunya penyelarasan antara ajaran, nilai-nilai kerohanian, sosial politik Islam yang terkandung dalam al-Qur'an dan Sunah Nabi dengan

⁸Suara Merdeka, 11 Nopember, 2013.

⁹M. Natsir, *Pedoman Perdjoengan Masjumi: Partai Politik Islam Indonesia*, (Jakarta: Dokumen Masjumi, 1946).

¹⁰H.A. Hafizh Dasuki, (Pimpinan Redaksi) *Ensiklopedi Islam*, Jilid IV. Cet. Ke-3 (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru van Hoeve, 1999), 21.

perkembangan zaman dan peradaban manusia. Gerakan politik menurutnya merupakan sarana dakwah bagi umat muslim untuk berperan serta dalam aktivitas politik. Lebih jauh M. Natsir menegaskan bahwa dalam berpolitik, haruslah berpegang kepada ideologi Islam, karena hal inilah yang menjadi dasar bagi masyarakat, negara dan kemerdekaan.¹¹

Catatan sejarah dalam perjalanan politik di Indonesia, menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dengan gagasan dan manuver M. Natsir untuk memperjuangkan umat, bangsa dan negara dari ancaman disintegrasi bangsa yang terkenal dengan konsep “Mosi Integral Natsir”¹². Tak dapat dipungkiri adanya perjuangan dan kontribusi bagi bangsa Indonesia yang tidak hanya dapat dinikmati oleh umat Islam namun dirasakan juga bagi semua warga negara hingga hari ini.¹³

Berkaitan dengan aktifitas politiknya tersebut terdapat berbagai penilaian beragam terhadap M. Natsir. Di kalangan birokrat dan nasionalis seperti Soekarno dan Soeharto, menempatkan M. Natsir dalam kelompok fundamentalis. Kedua pemimpin negara ini pernah memberikan sanksi politik berupa kurungan dan pengekangan terhadap aktivitas politiknya, karena dianggap sebagai tokoh yang cenderung menentang pemerintah. Penilaian berbeda juga muncul dari kalangan cendekiawan Muslim di Indonesia seperti Yusril Ihza Mahendra dan Deliar Noer, yang menilai M. Natsir sebagai tokoh modernis.¹⁴

¹¹Anwar Haryono, *Pemikiran dan Perjuangan M. Natsir*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), 1. Bandingkan dalam Yusril Ihza Mahendra, “Modernisme dan Demokrasi: Pandangan Politik M. Natsir”, *Islamika* No. 3, Januari-Maret 1994, 65.

¹²Yusril Ihza Mahendra, *Modernisme dan Fundamentalisme: Perbandingan antara Masyumi dan Jama'at al-Islami Pakistan*, (Jakarta: Paramadina, 1999), 221-226.

¹³Keputusan Mukhtar Masyumi ke VI di Jakarta tanggal 24-30 Agustus 1952. Dalam dokumen tersebut salah satunya menetapkan M. Natsir sebagai Ketua Umum Masjumi; Yusril Ihza Mahendra, *Pikiran dan Perjuangan M. Natsir*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), 7.

¹⁴Mahendra, *Modernisme dan Fundamentalisme: Perbandingan...*, 227.

Pada tanggal 17 Agustus 1960, partai Masyumi yang dipimpinnya akhirnya harus mengalami kenyataan pahit, karena dibubarkan oleh Presiden Soekarno melalui Keputusan Presiden Nomor: 200/1960. Namun berkat kegigihan dan semangat perjuangan M. Natsir tak pernah surut untuk membela bangsa dan negara. Ketika semua tokoh Islam Indonesia berusaha untuk mencari posisi pada ormas-ormas Islam, akibat pembubaran partai-partai Islam oleh Soekarno (ada yang bergabung ke Muhammadiyah seperti Kasman Singodimejo, dan ke NU seperti Idham Khalid dan KH. Masykur). M. Natsir justru tidak memihak kepada keduanya. Pada tanggal 26 Februari 1967, ia malah mendirikan organisasi dakwah “Dewan Dakwah Islam Indonesia” (DDII).¹⁵

Peran dakwah yang dilakukannya sejak mendirikan DDII seakan membawa babak baru dalam perjalanan dakwah di Indonesia. Melalui organisasi dakwah ini, banyak guru agama Islam yang diberangkatkan ke seluruh pelosok Indonesia. Kiprahnya dalam bidang dakwah menembus dunia Islam. Tahun 1967 ia menjadi wakil presiden Kongres Muslim Sedunia (*World Muslim Congres*) yang bermarkas di Karachi. Pada tahun 1969, ia masuk sebagai anggota (*Rabithah al-‘alam al-Islami*) di Makkah dan pada tahun 1976, Natsir bergabung dengan kepengurusan Masjid se-Dunia (*Al-Majlis al-A‘la al-‘Alami al-Masajid*) yang bermarkas di Makkah.

Konsep-konsep dakwah M. Natsir yang dikenal menegaskan kebenaran dan mencegah kemungkaran tampaknya dapat dengan mulus menerobos kehidupan umat.

¹⁵Dijelaskan bahwa sejak tidak terlibat dalam politik praktis, perhatian M. Natsir tercurah pada aktivitas dakwah melalui Dewan Dakwah Islam Indonesia. Di DDII ini M. Natsir dipercaya menjadi Ketua Umum hingga akhir hayatnya. Ia disegani oleh tokoh-tokoh Islam dari organisasi Islam kemasyarakatan terbesar di Indonesia seperti NU dan Muhammadiyah. Karena konsistensinya dalam memberikan pelayanan dakwah kepada masyarakat Indonesia, ia mendapat penghargaan dari King Faisal Foundation, Arab Saudi. M. Natsir, *Fisqhud Dakwah*, (Solo: CV. Ramadhani, 1965), 12. Bandingkan dengan Dasuki, *Ensiklopedi Islam*, 196.

Ajakan dakwah Islam tersebut menyentuh ke semua lapisan masyarakat Muslim dan non-Muslim di Indonesia.¹⁶ Baik pada zaman Soekarno ataupun Soeharto, M. Natsir tetap menunjukkan sikapnya konsisten dalam menjalankan dakwah, menyampaikan serta menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran. Dakwah M. Natsir lebih bersifat formal karena memanfaatkan media cetak berupa surat-surat resmi dan majalah yang dikelolanya, seperti Media Dakwah. Cara dakwah seperti ini juga ditujukan kepada tokoh-tokoh non Muslim yakni kepada para pendeta Paus Yohanes Paulus II.

Akibat pendekatan dakwah semacam ini, DDII oleh para pemegang pemerintahan sempat dicurigai sebagai kelompok ekstrim kanan, karena itu, dikalangan nasionalis dan abangan meminjam istilah Geertz, M. Natsir dipandang sebagai tokoh fundamentalis. Tentunya anggapan ini menurut penulis sangatlah berlebihan dan cenderung kurang memahami awal sejarah politik di Indonesia. Sebab M. Natsir melalui Masyumi sejak awal berusaha untuk menegakkan “kedaulatan rakyat”.¹⁷ Dalam tafsir asas Masyumi misalnya disebutkan bahwa “andaikan Indonesia ini berdasarkan Islam, maka semua orang berhak mendirikan partai-partai yang didasarkan oleh golongan, etnis, profesi, ideologi, dan sebagainya”. Dari tekad perjuangan inilah, ia menolak tegas kebijakan Soekarno, mengenai demokrasi terpimpin. Menurutnya dengan multi partai akan memperumit persoalan dan banyak menimbulkan permasalahan, tetapi kebijakan untuk membubarkan partai-partai tersebut akan berimplikasi pada persoalan yang sangat fundamental. Artinya, seandainya seluruh organisasi politik dibubarkan, yang tersisa hanyalah seorang diktator yang berkuasa.¹⁸

¹⁶M. Natsir, *Dakwah dan Pembangunan*, (Jakarta: Media Dakwah, 1978), 23.

¹⁷Tafsir Asas Masyumi (1952). Lihat M. Natsir, *Demokrasi di Bawah Hukum*, (Jakarta: Media Dakwah, 1986), 36.

¹⁸M. Natsir, *Islam Sebagai Ideologi*, (Jakarta: Pustaka Aida, 1951), 34.

Sosok M. Natsir berdasarkan ulasan di atas, digambarkan sebagai pejuang, politisi, negarawan yang sabar, santun, menjaga amanah dan sangat nasionalis, dalam arti sangat mencintai negeri ini. Meski dianiaya secara politik dan fisik oleh orde lama maupun orde baru, kecintaannya pada negeri ini tidak pernah surut. Ia masih mau turun tangan ketika terjadi kemacetan diplomasi dengan Malaysia, Jepang, Saudi Arabia dan negeri lain membantu Indonesia.

M. Natsir memang dikenal sebagai tokoh politisi ulung, dan negarawan yang halus tutur kata sehalus hati dan budi pekertinya. Ia bisa bergaul semeja dengan siapa saja, bahkan minum kopi bercengkrama dengan musuh politiknya sekelas Dipa Nusantara Aidit pada masa-masa perjuangannya di parlemen se usai pemilu pertama tahun 1955. Pergaulannya yang luas melintasi ideologi dan agama. M. Natsir menjadi fenomenal dan sangat akrab bahkan sampai ke hubungan-hubungan pribadi, pernah berboncengan dengan Ignatius J. Kasimo, Ketua Partai Katholik, pulang menuju rumahnya se usai sidang-sidang yang melelahkan di parlemen. Begitu pula ketika bersama Ketua Partai Kristen AM. Tambunan, tatkala memperjuangkan NKRI dengan mengajukan Mosi Intergral sebuah langkah brilian yang kemudian mengantarkannya ke kursi perdana menteri. Menurut Natsir, hal ini dilaksanakan demi kepentingan bangsa dan umatnya yang lebih besar.

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada uraian singkat yang telah diungkapkan dan mengingat arti penting peranan serta pengaruh perjuangan politik M. Natsir, sehubungan dengan pemikirannya tentang etika politik, maka perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bagaimanakah konsep pemikiran M. Natsir tentang etika politik?

2. Faktor-faktor apa saja yang mendorong munculnya pemikiran tersebut?
3. Apakah kontribusi M. Natsir sehubungan dengan konsep pemikirannya tentang etika politik, dalam kehidupan sosial politik di Indonesia?
4. Apakah terdapat relevansi pada konsep pemikiran M. Natsir tersebut, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, adalah untuk mencari jawaban atas persoalan-persoalan diatas sebagai berikut:

1. Memperoleh penjelasan secara konkret berkaitan konsep pemikiran M. Natsir tentang etika politik, bahwa dalam berpolitik tidak hanya ditempatkan sebagai proses untuk meraih kekuasaan semata, namun harus dilakukan sesuai dengan moralitas ataupun etika politik.
2. Mendapatkan gambaran yang jelas tentang faktor-faktor yang mendorong munculnya konsep pemikiran tersebut, termasuk kondisi sosial, politik, budaya dan pemikiran yang berkembang saat itu.
3. Memberikan kontribusi dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik, terutama dalam kaitan melaksanakan hak-haknya sebagai warga negara.
4. Mengetahui adanya relevansi pemikiran tersebut dengan kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan, baik dalam kehidupan masyarakat maupun bagi khasanah pengembangan ilmu pengetahuan antara lain:

1. Memberikan sumbangan pemikiran tentang filsafat moral atau etika politik, apabila dikaitkan dengan

kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahwa setiap warga negara dalam merealisasikan gagasan dan aktivitas politiknya, perlu landasan etika agar bermanfaat bagi seluruh lapisan kehidupan masyarakat.

2. Untuk membangun kesadaran bagi seluruh warga agar dalam melaksanakan hak-haknya, harus menghormati hak-hak warga yang lain, sehingga pelaksanaan hak-hak tersebut dapat dilaksanakan dengan baik.
3. Memberikan masukan terhadap perkembangan pemikiran etika politik, sebagai bagian dari filsafat dalam hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan perkembangan zaman dalam kehidupan modern, untuk membangun peradaban yang lebih bermartabat.
4. Sebagai tahap awal penelitian tentang etika politik, khususnya pemikiran M. Natsir yang dapat dikembangkan dalam penelitian lebih lanjut kepada tokoh-tokoh yang lainnya.

D. Kajian Pustaka

M. Natsir sebagai sosok tokoh pemimpin dan pemikir, wajar saja jika pemikirannya sering menjadi obyek kajian para tokoh dan ilmuwan baik dalam bentuk penelitian maupun sebagai tema dalam kajian, diskusi, seminar dan sebagainya. Dalam penelusuran penulis ditemukan beberapa kajian berupa disertasi, buku serta jurnal yang mengulas tentang M. Natsir dalam berbagai aspek. Empat kajian atau penelitian dalam bentuk disertasi, tigadiantaranya berbentuk buku, serta dua merupakan jurnal. Pada kesempatan ini penulis hanya mengemukakan empat inti kesimpulan disertasi, tiga buku, dan dua jurnal yang dimaksud; diantaranya Mohammad Thohir Luth, dalam kajiannya berjudul: *M. Natsir: Dakwah dan Pemikirannya*. Sebagai tokoh intelektual muslim dia menunjukkan pandangan tentang Islam yang moderat dalam menghadapi tantangan-tantangan yang ingin memojokkan

Islam. Dengan gerakan politiknya yang didasari *amar ma'ruf nahi munkar* demi tegaknya Islam, yang terdiri dari tiga pilar utama; yaitu amal perbuatan lisan, aktualisasi ajaran Islam dengan karya nyata, dan kepribadian terpuji sebagai sokogurunya. Pemahaman konsep dakwah tersebut, memiliki dampak baik sosiokultural dan geopolitik bagi masyarakat.¹⁹ Thohir Luth juga mengkritik gerakan dakwah M. Natsir yang terkesan terfokus pada pendekatan formal, terutama dalam menghadapi elit birokrasi. Tidak tampak gerakan dakwah dengan pendekatan kekeluargaan. Pendekatan yang serba formal ini, menimbulkan jarak cukup jauh dengan penguasa, sehingga menimbulkan sikap kurang akrab dan kurang bersahabat. Akibatnya, dirinya selalu dicurigai oleh elit birokrasi, bahkan dituding sebagai gerakan ekstrim kanan.

Mohammad Ris'an Rusli, mengkaji M. Natsir dalam perspektif teologi. Pada kajiannya, ia menyimpulkan bahwa teologi M. Natsir lebih dekat dengan teologi Mu'tazilah yang cenderung memberikan supremasi kepada akal. Namun ketika berbicara tentang perbuatan Tuhan, M. Natsir lebih cenderung kepada faham Asy'ariyah.²⁰

Asna Husin, dalam kajian penelitiannya berjudul: *Philosophical and Sociological Aspects of Da'wah: A Study of Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia*. Dia menarik kesimpulan bahwa secara filosofis dakwah M. Natsir melalui DDII cenderung kurang berkompromi dengan umat Islam Indonesia yang kondisi teologisnya masih sangat sinkretis, khususnya kalangan elit birokrasi. Selain itu, aktivitas dakwah M. Natsir melalui organisasi DDII juga kurang mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat. Penelitian ini ditulis untuk menyelesaikan studi tingkat doctoral di Columbia University

¹⁹Mohammad Thohir Luth, *M. Natsir: Dakwah dan Pemikirannya*, (Jakarta: Dalam penelitian Program Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah, 1999), 131.

²⁰Mohammad Ris'an Rusli, *Pemikiran Teologi M. Natsir*, (Jakarta: Dalam penelitian Program Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah, 1998), 287.

tahun 1998. Ia juga mengakui bahwa pengiriman para mubaligh ke berbagai daerah di Indonesia memang memberi dampak baik terhadap peningkatan kualitas kehidupan beragama. Namun belum dapat memberikan jalan keluar masyarakat Muslim Indonesia saat itu untuk mengatasi kesulitan ekonomi.²¹

Arif Hizbullah Sualman, dalam penelitiannya berjudul: *M. Natsir (1908-1993): His Role in the Development of Islamic Da'wah in Indonesia*, menyimpulkan bahwa gerakan dakwah M. Natsir memberikan kontribusi besar dalam proses pengembangan Islam di Indonesia. Program pengiriman mubaligh yang terus berlanjut hingga kini berhasil membangun dinamika kehidupan keagamaan masyarakat Muslim Indonesia.²²

Adapun dalam bentuk buku Lukman Hakiem sebagai editor (Ed) dalam *M. Natsir di Panggung Sejarah Republik*, sebuah buku yang banyak mengungkap secara historis aktifitas perjuangan, dan pemikiran politik M. Natsir di Indonesia. Kontribusinya kepada bangsa dan negara sebagaimana yang diungkapkan oleh para tokoh menyangkut peran dan kontribusi M. Natsir di Indonesia.²³

Sohirin Mohammad Solihin, *M. Natsir: Intellectualism and activism in modern age*, sebuah buku yang banyak mengupas tentang M. Natsir. Dalam buku ini diungkap latar belakang sejarah, pendidikan, pandangannya tentang Islam Versus Nasionalisme, pemikiran tentang politik dan agama, pemikiran Islam tentang Nasionalisme, Tauhid dan pendidikan,

²¹Asna Husin, *Philosophical and sociological aspects of da'wah. A study of the Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia*, (US: Columbia University, 1998).

²²Lihat Arif Hizbullah Sualman, *M. Natsir (1908-1993): His Role in the Development of Islamic Da'wah in Indonesia, (Historical Study of an Indonesian Mujahid Da'wah* (Malaysia: International Islamic University Malaysia, 1995).

²³Lukman Hakim, (Ed) *M. Natsir Di Panggung Sejarah Republik*, (Jakarta: Republika, 2008).

Demokrasi versus Absolutism, juga peran M. Natsir dalam kepemimpinan partai Masyumi.²⁴

Adrey R. Kahin, *Islam, Nationalism and Democracy Apolitical Biography of M. Natsir*, dalam buku tersebut, Ia memulai dengan mengeksplorasi secara gamblang sejarah perjalanan karir politik M. Natsir sebagai tokoh politik dan pemikir Muslim terkemuka di Indonesia. Kahin mencoba untuk memberikan pemahaman kepada pembaca tentang pandangan Natsir berkaitan dengan nasionalisme dan demokrasi. Tujuannya untuk mengetahui pengaruh modernisasi Islam di Indonesia. M. Natsir sebagai seorang politisi terkemuka juga pemimpin Muslim memberikan kontribusi yang sangat besar, bagi pembangunan politik di Indonesia.²⁵

Abdullah Firdaus, Mohd. Nasir Omar dan Idris Zakaria,²⁶ *Pemikiran Politik dan Kenegaraan M. Natsir*. Jurnal ini membahas pemikiran M. Natsir menyangkut masalah-masalah Islam dan Politik, Konsep Negara Islam, Karakteristik Pemimpin Negara, Nasionalisme dan Demokrasi Islam. Merujuk kepada apa yang diyakini oleh M. Natsir meliputi aspek sosial, politik dan negara dapat disimpulkan bahwa ajaran Islam di dunia harus berpihak kepada keadilan dan kesejahteraan. Secara khusus M. Natsir dengan lantang menuntut dasar perlembagaan negara Republik Indonesia berdasarkan Islam, yakni negara demokrasi berdasarkan Islam.²⁷

Firman Noor, *Islamic Party And Pluralism, The View and Attitude of Masyumi towards Pluralism in Politics (1945-*

²⁴Sohirin Mohammad Solihin, *M. Natsir: Intellectualism and activism in modern age*, (Malaysia : IIUM Press, 2003).

²⁵Adrey R. Kahin, *Nationalism and Democracy Apolitical Biography of M. Natsir*, (Singapore: NUS, Press, 2012).

²⁶Firdaus, dkk. 2015. Dept. Of Theology and Philosophy, Faculty of Islamic Studies, University Kebangsaan Malaysia. "Pemikiran Politik dan Kenegaraan M. Natsir", *Internasional Journal of Islamic Thought*, e-ISSN 2289-6023, Vol.7, (june), 2015.

²⁷*Ibid.* , 9.

1960), jurnal ini membahas tentang respon Masyumi terhadap pluralisme. Tentu saja dalam ulasannya M. Natsir berperan sebagai tokoh sentralnya. Terutama tentang keragaman politik dalam kurun waktu lima belas tahun setelah Indonesia merdeka. Masyumi dalam sejarah Indonesia dikenal banyak kalangan sebagai partai yang berhasil mengembangkan konsep demokrasi menjadi salah satu unsur penting dalam gerakan nasionalisme. Meskipun sikap positif Masyumi terhadap pluralisme ada beberapa kalangan yang meragukan, hal itu muncul karena adanya kecenderungan bahwa hanya umat Islam yang berhak memegang posisi kunci seperti presiden dan wakil presiden. Dengan argumen bahwa realitas bangsa Indonesia menunjukkan mayoritas muslim, sekitar 90% pada waktu itu. Pada akhirnya dalam ulasan menunjukkan bahwa partai Islam seperti Masyumi secara mandiri mengembangkan seperangkat pemikiran dan langkah yang kongkrit dan umum, sejalan dengan semangat pluralisme. Islam dalam pemahaman Masyumi menjadi dasar yang positif dalam menangani keragaman. Pikiran dan sikap Masyumi ini dalam batas tertentu mewakili karakteristik yang nyata dari mayoritas masyarakat dan warga secara keseluruhan yang masih hadir hingga sampai saat ini.²⁸

Dari kesimpulan keempat disertai dan tiga buku serta dua jurnal yang dikemukakan, menunjukkan belum ada yang membahas ataupun melakukan penelitian tentang etika politik. Maka tema kajian penulis berjudul: *Etika Politik M. Natsir*, merupakan *prior research* yang membuat kajian dalam penelitian ini layak dilakukan. Untuk menemukan hal-hal yang berkaitan dalam studi pemikiran M. Natsir tersebut.

²⁸Firman Noor, "Islamic Party An Pluralism, The View and Attitude of Masyumi toward Pluralism in Politics (1945-1960)", *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, Vol. 54, no.2 (2016), 273-310.

E. Kerangka Teori

Pemahaman terhadap konsep pemikiran etika dan politik perlu dilakukan sebelum merumuskan konsep tentang etika politik sebagai acuan pembahasan selanjutnya, juga sebagai upaya untuk menelusuri pemikiran M. Natsir tentang masalah tersebut.

1. Konsep tentang Etika

Kesepadanan pada istilah moral atau sopan santun, norma-norma serta etiket dengan etika secara umum sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari.²⁹ Padahal apabila diperhatikan muatan pemahaman pada masalah tersebut merupakan hal yang berbeda. Menurut K. Bertens menjelaskan bahwa moral merupakan nilai-nilai dan norma-norma yang mengatur perilaku.³⁰ Senada dengan Bertens, Lorens Bagus,³¹ menegaskan bahwa moral mencakup aktivitas manusia (baik atau buruk, benar atau salah, tepat atau tidak tepat) dalam hubungannya dengan orang lain.

Terdapat dua hal yang penting apabila diperhatikan dari definisi moral tersebut, yaitu; 1) nilai-nilai dan norma-norma yang mengatur perilaku, 2) aktivitas manusia dalam hubungannya dengan orang lain. Kedua hal tersebut menjadi penting karena bersifat absolut, sebab norma-norma atau nilai-nilai merupakan pedoman (tuntunan) bagi manusia dalam berperilaku dan hubungannya dengan orang lain.³²

Apabila dicermati pada konteks istilah seperti sopan santun atau etiket, maka akan terlihat makna pada dua istilah terakhir ini, bisa dimasukkan pada pemahaman moral

²⁹Lihat lebih lanjut K. Bertens, *Etika*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1994), 3-8.

³⁰*Ibid.*, 9-11.

³¹Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1996), 672.

³²Paul W. Taylor, "Introduction: What is Morality" dalam Paul W Taylor (ed), *Problems of Moral Philosophy an Introduction to Ethics*, (California: Dickenson Publishing Company Inc. California, 1967), 3.

sebagaimana yang telah disinggung, bahwa aturan tingkah laku manusia baik secara pribadi maupun berkelompok ketika berhubungan dengan sesamanya.³³

Berbeda dengan muatan pemahaman moral, maka muatan pada makna etika memiliki cakupan yang jauh lebih luas dan dalam, bila dibandingkan dengan muatan makna yang ditemukan pada moral seperti telah diungkap di atas. Frans Magnis Suseno menyatakan bahwa etika merupakan pemahaman yang lebih mendalam mengenai ajaran-ajaran, norma-norma, nilai-nilai serta kebiasaan-kebiasaan dan pandangan moral secara kritis.³⁴ Etika sendiri terdiri dari dua bagian yaitu etika umum dan etika khusus. Etika umum membahas kaidah-kaidah pokok seluruh aktivitas manusia dan etika khusus menelaah kaidah-kaidah tersebut khususnya antara hubungan manusia dengan lingkungannya.

Dibedakannya etika pribadi yang membahas kewajiban manusia bagi dirinya menggunakan nurani terhadap yang Illahi. Cakupan etika individual lebih sempit dibandingkan etika sosial, sebab etika sosial menyangkut seluruh kewajiban yang berkaitan dengan kedudukannya sebagai makhluk sosial, yang mencakup etika politik atau filsafat moral mengenai dimensi politis kehidupan manusia³⁵.

Pemaknaan etika seperti diungkap diatas, akan semakin jelas apabila mencermati pendapat-pendapat dari ahli yang mengungkapkan secara eksplisit, bahwa etika sebagai nama lain dari filsafat moral ketika menjadi sebuah kajian

³³Untuk makna etiket, lebih lanjut K. Bertens, 9-11. Sedangkan makna sopan santun lihat Frans Magnis Suseno, *Etika Politik (Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern)*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), 19.

³⁴Suseno, *Etika Politik (Prinsip-prinsip Moral ...)*, 13.

filosofis terhadap moral.³⁶ Pemaknaan etika dengan filsafat moral seperti ini, sekaligus menunjukkan bahwa kajian dalam etika bukan dalam bentuk studi deskriptif sebagaimana yang dilakukan oleh para ilmuwan sosial, seperti sosiolog, psikolog, antropolog, dan sejarawan, akan tetapi dalam bentuk kajian kritis yang mencakup dua segi, yakni normatif dan analitik (metaetik).³⁷

Amin Abdullah juga menyampaikan hal yang sama bahwa dalam studi etika kontemporer, para filosof mengklasifikasi diskursus etika menjadi tiga macam wilayah yang saling berhubungan. *Pertama*, etika mengandung arti seperangkat aturan-aturan tingkah laku (*moral code*) atau sering disebut “*normative ethics*”, seperti etika profesi, etika mengenai tingkah laku yang amoral dan lain-lain. *Kedua*, etika merujuk pada pandangan hidup atau cara hidup tertentu (“*applied ethics*”), misalnya etika Muslim, etika Kristen, etika Jawa dan begitu juga seterusnya. *Ketiga*, wilayah “*metaethics*” yaitu penelitian dan penyelidikan mengenal *way of life* suatu kelompok atau individu dalam dataran, *applied ethics*.³⁸ Berkaitan dengan masalah tersebut, maka etika politik masuk pada wilayah *applied ethics*.

Disiplin *metaethics* jarang dikenal pada wilayah pemikiran keagamaan baik secara umum ataupun khusus.³⁹ Kondisi demikian terjadi karena terbawa dari kebiasaan yang menjelaskan bahwa pandangan hidup keagamaan merupakan *ultimate concern*. Yaitu persoalan yang paling berharga atau persoalan antara hidup dan mati, sehingga tidak boleh dikoreksi ataupun diganggu gugat. Istilah

³⁶Paul W, Taylor, “Introduction: What is Morality” dalam Paul W Taylor (ed), *Problems of Moral Philosophy an Introduction to Ethics*, (California: Dickenson Publishing Company Inc. California, 1967), 7.

³⁷*Ibid.*, 8.

³⁸M. Amin Abdullah, *Islamic Studies di Perguruan Tinggi Pendekatan Integratif Interkonektif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 22-23.

³⁹*Ibid.*, 22.

ultimate concern menurutnya berubah menjadi sesuatu yang sangat peka, sehingga harus cepat dimasukkan dalam klasifikasi SARA (Suku, Ras, Agama dan Antargolongan).

Menurut Haryatmoko menjelaskan, bahwa konsep “moral” sering digunakan sebagai sinonim dengan “etika”.⁴⁰ Dua hal tersebut muncul dari tradisi pemikiran khasanah pemikiran filsafat moral yang sangat berbeda. Makna istilah ini sebenarnya sangat kaya: “etos” berarti suatu cara berpikir dan merasakan, suatu cara bertindak dan bertingkah-laku, yang memberi ciri khas kepemilikan seseorang terhadap kelompok dan sekaligus merupakan tugas. Istilah moral selaras dengan bahasa latin “moralis” yang berkembang menjadi istilah teknis yang tidak bisa lagi berarti sebagai kebisaan, tetapi mengandung makna “moral” seperti digunakan dalam pengertian sekarang. Moral selalu dihubungkan dengan kewajiban tertentu, apabila dikaitkan dengan norma, yang berarti sebagai cara bertindak yang berupa tuntutan entah relatif entah mutlak.

Moral dapat disimpulkan melalui baik buruknya manusia terkait tindakannya, sikapnya dan cara mengungkapkannya. Moral mencoba menjawab pertanyaan: “Apa yang harus saya lakukan?”. Dengan demikian, konsep moral mengandung dua makna: 1) semua aturan dan norma yang berlaku, yang diterima oleh suatu masyarakat tertentu, sebagai arah atau pegangan dalam berperilaku, dan muncul dalam kerangka yang baik dan yang buruk; 2) disiplin filsafat yang merefleksikan tentang norma-norma tersebut dalam rangka mencari landasan dan tujuan atau finalitasnya. Pengertian yang kedua ini lebih dekat dengan penggunaan konsep etika.

Etika biasanya dipahami sebagai refleksi filosofis tentang moral. Jadi, etika lebih merupakan wacana normatif, tetapi tidak selalu imperatif, karena bisa juga

⁴⁰Haryatmoko, *Etika Politik dan Kekuasaan*, 186-187.

hipotesis, yang membahas baik dan yang buruk, yang dianggap sebagai norma yang relatif. Etika ingin menjawab pertanyaan “Bagaimana hidup yang baik?”. Jadi, etika lebih dinilai sebagai seni hidup yang mengarah kepada kebahagiaan dan kebijakan.

Dari uraian di atas dapat diketahui perbedaan makna antara moral dan lain-lainnya dengan etika. Bila pada moral dan lain-lainnya itu memiliki makna tentang bagaimana bertingkah laku yang berdasarkan nilai-nilai yang telah diakui oleh individu atau kelompok ketika bergaul dengan individu atau kelompok lainnya. Maka pada etika selain seseorang dituntut dapat bertingkah laku sesuai dengan norma-norma tertentu, melainkan juga dituntut mampu memahami sistem, landasan norma serta rumusan pemikiran yang rasional untuk menuju kehidupan yang lebih baik. Dengan istilah lain dalam pemahaman etika sama pentingnya dengan memahami landasan norma-norma moral.

Dikalangan pemikir Islam seperti al-Kindi (w.260 h/ 873 m) menyatakan manusia disamping memiliki akal juga memiliki keinginan dan nafsu. Ketiga hal ini ditampilkan oleh al-Kindi bagaikan raja, babi dan anjing. Menurutnya manusia yang mulia adalah ketika akalnya mampu melaksanakan kontrol secara penuh terhadap dua daya yang lainnya. Menurut al-Kindi kesempurnaan moral manusia hanya bisa diraih oleh jiwa yang telah meninggalkan badan, sebab kaitannya dengan badan di dunia ini, terlihat dari pengaruhnya yang diberikan oleh keinginan dan nafsu badaniah terhadap jiwa, maka dengan meninggalkan badan dan kembali ke dunia spiritual, disanalah ia dapat menemui Tuhannya menuju puncak kesempurnaan.⁴¹

Berkaitan dengan persoalan diatas, al-Farabi (w.339h/ 950m) menyatakan bahwa pikiran menurutnya berkaitan

⁴¹Al-Kindi, *Rasa'il al-Kindi al-Falsafiya*, Muhammad Abd al-Hadi Abu Ridha (ed.), (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabiyy, 1950), 273.

dengan cara-cara yang bermanfaat untuk meraih suatu tujuan. Melalui pikiran akan diketahui yang paling baik untuk menemukan yang paling bermanfaat guna meraih suatu tujuan. Tujuan ini boleh saja benar-benar baik atau benar-benar tidak baik, atau hanya dapat diyakini tujuan ini baik. Maka pikiran ini bagi al-Farabi dikelompokkan pada kebajikan berfikir, yaitu daya jiwa yang dipakai untuk menemukan apa yang paling bermanfaat untuk hal-hal yang hanya dinyatakan baik.⁴²

Ibn Miskawaih (w.1030 m) juga seperti al-Kindi yang percaya bahwa manusia terdiri dari dua substansi yakni badan dan jiwa. Dua substansi ini saling bertentangan ketika badan menginginkan kesenangannya, sebaliknya jiwa menjauhkan diri kesenangan seperti itu. Hal ini karena jiwa mendambakan keberadaan Tuhan. Ketika badan tidak mampu mengetahui dirinya kecuali dengan bantuan indra yang secara alami cenderung pada kekeliruan dan kesenangan. Maka jiwalah mengambil pengetahuan dari esensi dirinya yaitu akal, bahkan akal dapat meralat keputusan-keputusan yang keliru yang telah dibuat oleh indra.⁴³

Subtansi jiwa bagi Ibn Miskawaih tidak dapat diketahui oleh indra, jiwa bukan badan dan bukan pula bagian dari badan. Sesuai dengan tujuannya untuk meraih kebahagiaan dan kesempurnaan, maka jiwa akan selalu menentang semua bentuk kesenangan badaniyah yang mengganggu pencapaian tujuannya.⁴⁴ Badan itu sendiri menurut Ibn Miskawaih diposisikan sebagai alat bagi jiwa untuk merealisasikan kesempurnaannya. Oleh karena itu ketinggian manusia baginya adalah diukur dengan

⁴²Al-Farabi, "The Attainment of Happiness" dalam Muhsin Mahdi, *Al-Farabi's Philosophy of Plato and Aristotle*, (New York: The Free of Glencol, 1962), 28.

⁴³Ibn Miskawaih, *Tahdhib al-Akhlaq*, 29-31.

⁴⁴*Ibid.*, 33-34.

upayanya mendapatkan kebajikan dan kesempurnaan yang merupakan kebahagiaan tertinggi melalui jiwa.⁴⁵

Ibn Sina (w.1037 m) menerangkan etika sebagaimana para filosof Muslim lainnya pada masa itu terarah tentang bagaimana manusia dapat meraih kebahagiaan duniawi maupun ukhrawi. Belum dapat diraihny kebahagiaan dan derajat tertinggi melalui perilaku bajik (fadhoil) dikarenakan perilaku-perilaku ini bagi Ibn Sina masih tergolong dalam perilaku kebajikan moral praktis yang hanya untuk kebaikan dunia. Kebahagiaan sesungguhnya untuk meraih derajat tertinggi akan dapat diraih seseorang bila telah dapat meraih perilaku kebajikan moral praktis sekaligus kebajikan intelektual teoritis.

Kebajikan intelektual teoritis yang disebut juga hikmah teoritis adalah kebajikan yang tertinggi yang memungkinkan seseorang dapat meraih kebahagiaan yang sesungguhnya serta derajat yang tertinggi. Hal ini dikarenakan kebajikan kelompok ini bukan lagi berbicara pada persoalan tujuan yang baik bagi manusia, atau membebaskan jiwa dari badan sebagaimana kebajikan moral praktis, akan tetapi lebih terarah pada pencarian tujuan kebenaran yang sesungguhnya dan melampaui dunia ini, sehingga jiwa dapat memposisikan langsung kepada Tuhan.⁴⁶

Pemikiran Ibn Sina menjelaskan bahwa perilaku moral berdasarkan pemikiran-pemikiran diatas, merupakan perilaku yang bajik kendatipun memiliki persamaan dengan filosof lain seperti al-Farabi dan Ibn Miskawaih sebagai hasil daya jiwa. Namun peranan perilaku-perilaku bajik ini secara langsung untuk menghantarkan meraih tingkat derajat tertinggi dan kebahagiaan sesungguhnya. Ibn Sina berbeda dengan kedua filsuf di atas, ia menjelaskan bahwa

⁴⁵Ibn Miskawaih, *al-Fawz al-Asqhar*, Dar al-Maktabat al-Haya, (Beirut, t.t), 134.

⁴⁶Ibn Sina, *Risala fi 'Ilm al-Akhlaq* dalam Majid Fakhry (ed), 148.

derajat tertinggi dan kebahagiaan sesungguhnya baru dapat diraih bila seseorang memiliki perilaku-perilaku moral praktis, bersama-sama dengan kebajikan intelektual teoritis atau hikmah teoritis. Tanpa yang terakhir ini, seseorang hanya baru dapat membebaskan dari hal-hal yang tidak terpuji tetapi belum dapat menghantarkan pada Tuhannya.

Pemikiran para filosof diatas, apabila dikaitkan dengan konsep pemikirannya tentang perilaku moral atau etika yang telah disampaikan sebelumnya, pada dasarnya merupakan tingkah laku manusia, yang dilandasi oleh suatu kebajikan untuk meraih kebahagiaan dan derajat yang tinggi dalam kehidupan. Selanjutnya apabila ditelusuri secara cermat, maka pemikiran dari kalangan filsuf Islam, dikaitkan dengan pemikiran-pemikiran sebelumnya tentang moralitas ataupun etika secara esensial nampaknya terdapat titik temu. Sebab dalam pemikiran sebelumnya ditegaskan, bahwa etika pada dasarnya ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan bagaimana hidup yang baik, jadi etika lebih dipahami sebagai seni hidup ataupun usaha menuju kebahagiaan dan mengarah serta memuncak pada kebijakan ataupun derajat yang lebih tinggi dalam kehidupan. Sedangkan pandangan dari kalangan filsuf Islam menyatakan bahwa perilaku moral atau etika pada dasarnya adalah perilaku baik, yaitu perilaku manusia yang dilandasi kebajikan atau kebaikan untuk mencapai kebahagiaan dan meraih derajat yang lebih tinggi, sehingga ada titik temu diantara kedua pemikiran tersebut.

2. Konsep tentang Politik

Perkataan politik telah berkembang dalam kehidupan bernegara di tanah air kita. Malah sebelum kita bernegara di abad kedua puluh ini, yaitu ketika Belanda masih menanamkan kekuasaannya di Indonesia, istilah politik sudah menimbulkan pengertian yang beragam bagi pihak-pihak yang mempergunakan atau memperbincangkannya.

Karena politik merupakan ciri khas dalam dimensi kehidupan manusia. “Dimensi politik manusia” adalah dimensi masyarakat secara keseluruhan. Sebuah keputusan bersifat politis apabila diambil dengan memperhatikan kepentingan masyarakat sebagai keseluruhan. Suatu tindakan harus disebut politis apabila menyangkut masyarakat sebagai keseluruhan. Politisi adalah orang yang mempunyai profesi yang mengenai masyarakat sebagai keseluruhan.⁴⁷

Menurut al-Mawardi, ada dua faktor utama yang menyebabkan manusia tidak dapat hidup, kecuali bekerjasama dan butuh saling menolong antar sesama umat manusia. Pertama, manusia merupakan makhluk Allah yang lemah, baik secara fisik maupun psikis. Manusia juga membutuhkan sesuatu yang harus terpenuhi bagi kelangsungan hidupnya. Tanpa semua itu, manusia tidak dapat mempertahankan eksistensinya dimuka bumi. Kebutuhan-kebutuhan itu demikian banyak dan beragam sifatnya, yang menjadikan seseorang tidak akan mampu untuk memenuhi segala kebutuhannya sendiri, tanpa adanya pertolongan dan kerjasama dengan sesamanya. Oleh karena itu manusia merupakan makhluk yang senantiasa membutuhkan keberadaan orang lain dan tolong menolong yang merupakan tabiat dasar yang melekat pada diri setiap orang.⁴⁸

Kedua, manusia merupakan makhluk Allah yang sengaja diciptakan dengan memiliki kemampuan yang berbeda-beda antara yang satu dengan yang lain. Apa yang dapat dikerjakan dan dihasilkan oleh seseorang belum tentu dapat dikerjakan dan dihasilkan orang lain. Sebaliknya apa yang dapat dikerjakan dan dihasilkan orang lain, juga belum tentu dapat dikerjakan dan dihasilkan oleh seseorang yang

⁴⁷ Suseno, *Etika Politik, (Prinsip-Prinsip Moral Dasar...*, 19-20.

⁴⁸ Al-Mawardi, *Adabal-Dunyawaal-Dini, TahqiqMustafaal-Saqa*, (Ttp: Dar al-Fikri, tt), 132 dan 208.

lain. Adanya perbedaan-perbedaan tersebut, pada gilirannya akan semakin menguatkan naluri manusia untuk saling menolong antar sesama manusia, baik untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokoknya maupun untuk mempertahankan keamanan dan keselamatan jiwa mereka. Sebab apabila setiap manusia mempunyai kemampuan dan tabiat yang sama, niscaya tidak pernah ada kesempatan untuk mengembangkan sikap saling menolong dan sebagai akibatnya, manusia akan menjadi semakin lemah, karena ia tidak mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokoknya. Lain halnya jika terdapat perbedaan diantara mereka, mereka akan menjadi bersatu, tolong-menolong dan saling berhubungan karena kebutuhan-kebutuhan mereka.⁴⁹ Sehingga manusia tidak bisa hidup sendiri, perlu bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan serta mempertahankan kehidupannya.

Secara historis Aristoteles (384-322 SM) menjelaskan bahwa politik berkaitan dengan asal usul negara, sebab baginya kemunculan negara tidak bisa dipisahkan dari watak politik manusia. Menurutnya manusia adalah *zoonpoliticon*, makhluk yang berpolitik. Karena watak alamiahnya demikian, negara dibutuhkan sebagai cara untuk aktualisasi watak manusia itu. Lebih lanjut dikatakan negara adalah lembaga politik yang paling berkuasa, meski bukan berarti negara tidak memiliki batasan kekuasaan. Negara memiliki kekuasaan tertinggi hanyalah karena ia merupakan lembaga politik yang memiliki tujuan yang paling tinggi dan mulia. Adapun tujuan dari dibentuknya negara adalah untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh warga negara⁵⁰.

Senada dengan yang disampaikan oleh Thomas Aquinas (1226-1274), bahwa naluri sosial manusia

⁴⁹*Ibid.*, 135.

⁵⁰Ahmad Suhelmi, *Pemikiran Politik Barat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), 44-45.

merupakan cikal bakal terbentuknya otoritas politik atau negara. Negara sebagai bentuk simbol dan pusat kekuasaan politik tetap merupakan suatu organisasi yang terikat pada hukum. Artinya negara sebagai organisasi manusia bisa semata-mata bersifat sekuler, ia menjadi bagian dari dunia dan bersifat duniawi semata.⁵¹

Rousseau (1712-1778) menyatakan bahwa negara adalah hasil kesepakatan atau kontrak sosial. Negara berdaulat karena mendapat kepercayaan dari masyarakat, sehingga dapat mengatur dan melindungi rakyatnya. Kekuasaan tersebut bisa dipertahankan apabila dilaksanakan sesuai kehendak rakyat dan apabila hal itu tidak dilaksanakan sesuai keinginan rakyat akan terjadi krisis kekuasaan.⁵²

Sementara Montesquieu terkait pemikiran politiknya dalam kontek kekuasaan menjelaskan, dengan teorinya *Trias Politica* yang berarti perlu adanya pembagian kekuasaan menjadi tiga bentuk yakni; kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif, lembaga atau kekuasaan legislatif yang bertugas utamanya mengkonsep undang-undang atau aturan negara. Lembaga legislatif adalah perwujudan atas kekuasaan rakyat. Namun, rakyat menurut Montesquieu adalah berbentuk dewan rakyat bukan orang-orang yang mewakili rakyat. Badan Legislatif dalam bentuknya yang paling konkrit: DPR, kabinet atau Parlemen.⁵³ Selanjutnya Montesquieu (1689-1755), menjelaskan bahwa Kekuasaan legislatif dan eksekutif apabila disatukan maka tidak mungkin tercipta kemerdekaan,. Apabila kekuasaan mengadili disatukan dengan kedua kekuasaan itu, kemerdekaan rakyat akan terancam, karena hakim

⁵¹*Ibid.*, 100.

⁵²*Ibid.*, 251-252.

⁵³*Ibid.*, 228.

merupakan pihak pembuat hukum, sehingga hakim akan bertindak dengan kekerasan dan penindasan.⁵⁴

Masih berkaitan dengan persoalan politik di atas, dalam hubungan kekuasaan bagi seorang penguasa, menurut Machiavelli (1467-1527) membahas perebutan kekuasaan (kerajaan). Bila seseorang telah menguasai suatu negara, terdapat aturan dalam melaksanakan pemerintahan dan cara menjaga kekuasaan tersebut, dengan cara: Pertama, menyenapkan penguasa negara sebelumnya beserta seluruh saudaranya, sebab hal itu dianggap akan menimbulkan gangguan dan ancaman bagi pemimpin baru. Kedua, dengan melakukan kolonisasi, dengan meningkatkan kekuatan militer di wilayah yang dikuasai serta menjaga kerjasama dengan penguasa-penguasa disekitarnya. Romawi merupakan bangsa yang pernah mengadaptasi cara kolonisasi. Machiavelli mengungkapkan bahwa aturan pertama merupakan langkah yang sangat efektif untuk dilaksanakan, meskipun hal itu tidak sesuai dengan moralitas.⁵⁵

Persoalan politik apabila didasarkan kepada berbagai pandangan di atas, bahwa politik merupakan ciri khas dalam dimensi kehidupan manusia, sebab sebuah tindakan akan dinilai bersifat politis apabila diambil dengan memperhatikan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Sementara disisi lain manusia butuh bekerja sama dengan yang lain untuk memenuhi kebutuhan dan mempertahankan kehidupan mereka. Politik pada dasarnya berkaitan erat dengan asal usul negara, karena terbentuknya suatu negara berawal dari watak politik manusia (*zoon politicon*) dimana negara berperan dalam merealisasikan watak manusia tersebut. Pandangan tersebut sesuai dengan

⁵⁴Deliar Noer, *Pemikiran Politik di Negeri Barat*, (Jakarta: Rajawali Press, 1982), 100.

⁵⁵*Ibid.*, 133.

pemikiran Aristoteles bahwa negara didirikan untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya.

Thomas Aquinas mendefinisikan negara sebagai bentuk simbul dan akumulasi kekuasaan politik, tetap merupakan suatu organisasi yang tidak dapat dilepaskan dari aturan (hukum). Sementara menurut Rousseau negara merupakan produk kesepakatan warga dan negara, negara diberikan mandat untuk menata dan melindungi warganya, apabila tidak dijalankan dengan baik akan terjadi krisis. Disisi lain agar kekuasaan negara tidak dijalankan sewenang-wenang, maka kekuasaan memang perlu dipisahkan. Montesquieu mengklasifikasikan kekuasaan menjadi tiga, yaitu: kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif. Sedangkan menurut Machiavelli negara sebagai wujud kekuasaan, pelaksanaannya dapat dilaksanakan dengan jalan kekerasan, meskipun bertentangan dengan moral.

Sehubungan dengan persoalan politik apabila dikaitkan dengan kekuasaan, merupakan simbol ataupun sebagai wujud aktualisasi watak manusia, maka negara dibutuhkan seperti yang disampaikan di atas. Diantara pengertian yang dimaksud politik adalah kegiatan untuk mempengaruhi kekuasaan, dengan jalan mengubah atau mempertahankan, suatu macam bentuk susunan masyarakat.⁵⁶

Perdebatan tentang negara dan kekuasaan dalam kajian ilmu politik, merupakan dua persoalan utama yang akan senantiasa diperbincangkan dan diakui sebagai hakekat dari politik itu sendiri. Pada awalnya persoalan politik diidentikkan dengan persoalan tentang negara dan hal-hal yang berhubungan dengannya. William T. Bluhm menjelaskan bahwa persoalan politik tidak dapat dipisahkandari persoalan kekuasaan. Apabila disimpulkan menjadi unsur-unsur universal, politik merupakan suatu

⁵⁶Deliar Noer, *Pengantar Ke Pemikiran Politik*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1983), 1, 2 dan 6.

proses sosial yang bercirikan aktivitas yang menyangkut persaingan dan kerja sama dalam melaksanakan kekuasaan.⁵⁷ Politik merupakan persoalan bagaimana caranya memperoleh, mempertahankan dan mengembangkan kekuasaan.⁵⁸

Ilmu politik berdasarkan sifatnya yang mendasar ini, banyak ditemukan kajian dan konsep-konsep mengenai kekuasaan. Sekalipun demikian, ada satu anggapan dasar bahwa kekuasaan merupakan kemampuan untuk mempengaruhi orang lain untuk berperilaku yang sama dengan perilaku orang yang memegang kekuasaan.⁵⁹ Dari ungkapan tersebut dapat dipahami bahwa politik merupakan proses tentang bagaimana caranya seseorang itu dapat memperoleh, mempertahankan dan mengembangkan kekuasaan. Hanya saja untuk mendapatkan kekuasaan tersebut, apakah harus dengan menggunakan kekerasan ataupun cara-cara yang sesuai dengan aturan moralitas sebagaimana yang disampaikan sebelumnya.

Islam memandang pemikiran politik sebagai pemikiran yang berkaitan dengan urusan umat manusia, dimana nantinya terdapat pengaturan dan pemeliharaan. Pemahaman politik menurut Islam didasarkan pada Aqidah Islam dan spiritual, hal ini berarti bahwa aturan-aturan yang dibuat menekankan pada aspek urusan dunia dan akhirat. Aqidah Islam mengatur pola hubungan manusia dengan Tuhannya, berkaitan dengan pemerintah, ekonomi, hubungan sosial, pendidikan politik dalam dan luar negeri, hubungan antara rakyat dan penguasa, hubungan antar

⁵⁷William T. Blum, *Theories of the Political Systems Classics of Political Thought and Modern Political Analysis*, Third Edition, (N.J. Prentice Hall: Englewood Cliffs, 1978), 5.

⁵⁸Zaenuddin A. Rahman, *Kekuasaan dan Negara*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), 5.

⁵⁹Miriam Budiarjo, *Konsep Kekuasaan*, Tinjauan Kepustakaan (ed) Aneka Pemikiran tentang Kuasa dan Wibawa, (Jakarta: Sinar Harapan, 1984), 9.

negara, dan lainnya.⁶⁰ Selanjutnya dikatakan bahwa pemikiran politik dalam Islam dibangun atas dasar yang mengandung tiga prinsip yang merupakan pilar utama dalam politik Islam yakni; keadilan, demokrasi dan persamaan, sebagaimana yang telah disampaikan al-Qur'an.⁶¹

Sehubungan dengan pemikiran tersebut, maka kedaulatan negara merupakan suatu kenyataan faktual, yaitu negara merupakan lembaga yang memiliki wewenang untuk mengatur kehidupan dalam masyarakat yang dikuasainya, namun wewenang faktual tersebut telah menimbulkan pertanyaan tentang pertanggungjawaban dalam penggunaannya. Fakta bahwa negara berwenang untuk mengatur segala-galanya bukan berarti negara secara moral berhak untuk mengatur semuanya. Negara wajib untuk mempertanggungjawabkan atas apa yang mau dilakukannya. Penggunaan kekuasaan dan kedaulatan negara menuntut legitimasi moral.⁶²

Kekuasaan diperoleh karena kedudukannya sebagai imam atau khalifah merupakan pengganti Rasulullah dalam memegang mandat dari Allah untuk menegakkan kaidah-kaidah agama Islam dan mewujudkan kemaslahatan umum bagi umat manusia. Kekuasaan bagi al-Mawardi ditegakkan bukan saja untuk menjaga sendi-sendi dasar agama tetapi juga harus ditegakkan sesuai dengan norma-norma agama itu sendiri.⁶³

Dalam kaitan ini, al-Mawardi tidak saja memandang agama sebagai sendi dasar kekuasaan imamah atau khalifah merupakan otoritas pengganti kedudukan Rasulullah yang

⁶⁰Abullah Qodim Zallum, *Pemikiran Politik Islam*, (Bangil: Al-Izzah, 2001), 5-10.

⁶¹Buthros Buthros Gholy, *al- Madkhol fi Ilmi al- Siyasa*, (Kairo: Maktabah al-Anjalu al-Misriyah, 1976), 70.

⁶²Suseno, *Etika Politik (Prinsip-prinsip Moral Dasar ...)*, 185.

⁶³Al-Mawardi, *Tashil al-Nazar wa Ta'jil al-Zafaar*, (Beirut: al-Nahdah al-Misriyyah, 1981), 148.

arahnya sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Tetapi juga karena agama secara umum merupakan sendi dasar kekuasaan yang paling kokoh yang mampu membangkitkan kepatuhan massa secara sukarela.⁶⁴ Oleh sebab itu kata al-Mawardi ibarat dua saudara kembar agama dan kekuasaan tidak bisa berdiri sendiri-sendiri tanpa kehadiran di antara keduanya.⁶⁵ Politik pada dasarnya dapat disimpulkan sebagai implementasi dari kekuasaan dalam suatu negara, dalam pelaksanaannya harus dilandasi dengan moralitas yang sesuai ajaran agama untuk menegakkan masyarakat, negara dan kemerdekaan. Karena pada dasarnya moralitas berasal dari aturan agama akan memberikan dasar kekuatan yang kokoh bagi kekuasaan (politik). Sebab akan menumbuhkan kepatuhan bagi warga secara sukarela sehingga antara moralitas dan kekuasaan tidak bisa dipisahkan.

3. Konsep tentang Etika Politik

Sekilas dalam kajian sebelumnya telah disinggung tentang etika dan politik, baik dari kalangan pemikir secara umum maupun dari kalangan pemikir Islam tentang konsep pemikiran etika dan politik, dalam kaitannya untuk menemukan konsep pemikiran dari M. Natsir sehubungan dengan konsep pemikirannya tentang etika politik.

Sebelum memasuki pada persoalan tersebut, perlu diketahui bahwa sebagai kajian ilmiah filsafat pun dibagi kedalam beberapa cabang, terutama menurut bidang yang dibahasnya. Dua cabang utama filsafat adalah filsafat teoritis dan filsafat praktis. Yang pertama mempertanyakan apa yang ada, sedangkan yang kedua, bagaimana manusia harus bersikap terhadap apa yang ada itu. Sedangkan filsafat yang langsung mempertanyakan praksis manusia adalah etika. Etika mempertanyakan tanggung jawab

⁶⁴*Ibid.*, 151-153.

⁶⁵*Ibid.*, 149.

manusia dan kewajiban manusia. Dan disini termasuk juga etika politik atau filsafat moral mengenai dimensi politis kehidupan manusia.⁶⁶ Tegasnya manusia dalam berpolitik apabila dikaitkan dengan kekuasaan harus dilandasi dengan moral sehingga kekuasaan dapat dipertanggungjawabkan. Hal itu sebagaimana pandangan al-Mawardi maupun Ibn Khaldun dalam kajian sebelumnya mengemukakan bahwa, baik moralitas ataupun agama dan kekuasaan tidak dapat dipisahkan.

Berkaitan dengan masalah tersebut al-Ghazali menjelaskan bahwa akhlak atau moral itu, lebih dahulu adanya daripada negara dan politik baik dalam sejarah maupun didalam kejadiannya. Ia menjadi sumber dari setiap tindakan perbuatan manusia sebagai pribadi, ia menjadi sumber pula setiap tindakan dan perbuatan masyarakat sebagai ikatan dari sesama manusia. Sebab itu ia menjadi ukuran yang tegas bagi politik negara dari suatu bangsa, baik untuk menetapkan suatu kebijakan politik yang baik maupun sebaliknya. Oleh karena itu al-Ghazali mengambil kesimpulan bahwa moral dan politik harus bersatu padu tidak boleh dipisahkan.⁶⁷ Hal yang senada disampaikan Fazlur Rahman bahwa Islam hadir sebagai “tuntunan moral bagi tindakan manusia.”⁶⁸

Sehubungan dengan masalah tersebut, Muhammad Imarah menyatakan; bahwa Islam merupakan ajaran agama, tidak menentukan suatu sistem pemerintahan tertentu bagi kaum Muslim, karena logika tentang keselarasan agama inisesuai perkembangan zaman yang menuntut agar persoalan-persoalan yang muncul tersebut diserahkan

⁶⁶Suseno, *Etika Politik, (Prinsip-Prinsip Moral ...*, 12-13.

⁶⁷H. Zainal Abidin Ahmad, *Konsep Negara Bermoral Menurut Imam Al-Ghazali*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 160-162.

⁶⁸Fazlur Rahman, *Islam*, (New York, Chicago, San Fransisco: Holt, Reinhart, Winston, 1966), 241.

kepada pemikiran manusia untuk memikirkannya.⁶⁹ Maka yang perlu dicatat adalah, bahwa Islam mengandung nilai-nilai dan ajaran-ajaran yang bersifat etis yang menjadi panduan moral dalam kehidupan manusia yang menyangkut aktivitas sosial dan politik, yang meliputi prinsip-prinsip tentang “keadilan, kesamaan, persaudaraan, dan kebebasan”.⁷⁰ Sejalan dengan pandangan tersebut, Nurcholish Madjid mengungkapkan bahwa etika politik, sebagai sesuatu cita-cita politik modern Indonesia selalu memunculkan tiga kata kunci yakni; suatu masyarakat yang adil, terbuka dan demokratis.⁷¹

Selanjutnya Fachri Ali menjelaskan, bahwa Islam berkembang bukan sebagai agama dalam pengertian religi, melainkan juga telah menjadi nilai yang mendasari sistem budaya masyarakat, bahkan telah menjadi simbol identitas. Sumber-sumber kekuasaan politik hampir sepenuhnya berasal dari nilai Islam. Siapapun yang berkuasa, senantiasa harus memperhatikan Islam. Bahkan lewat penguasaan terhadap ajaran-ajaran Islam ia naik dalam jenjang kekuasaan. Menjauhkan diri dari Islam atau umat Islam akan menyebabkan berkurang atau bahkan runtuhnya kekuasaan seseorang. Kehancuran Majapahit dapat dinilai dari sudut pandang ini, yaitu antara lain disebabkan oleh semakin tingginya nilai legitimasi kekuasaan Islam, sehingga semakin mudarnya nilai legitimasi kekuasaan dari ajaran-ajaran non Islam.⁷² Hal yang samajuga disampaikan oleh A. Syafi'i Ma'arif bahwa dari sudut pandangan muslim cita-cita kekuasaan (politik) menyatu

⁶⁹Muhammad Imarah, *Al-Islam wa al-Sulthah al-Diniyah*, (Kairo: Dar al-Thaqafah al-Jadidah, 1979), 76-77.

⁷⁰Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Islam as the Basic of State: A Study of the Islamic Ideas Political Ideas as Reflected in the Constituent Assembly Debates in Indonesia* (disertasi doktor, University of Chicago: 1983), 23.

⁷¹Nurcholish Madjid, *Cita-Cita Politik Islam Pasca Reformasi*, (Jakarta: Paramadina, 1999), xiv.

⁷²Fachri Ali. *Pasang Surut Peranan Politik Ulama*, Prisma: 4 April 1984, 19-30.

dengan wawasan moral sebagai pancaran dari iman seseorang muslim. Politik dengan demikian berasal dari ajaran agama (wahyu).⁷³

Pandangan Frans Magnis Suseno menyatakan, bahwa etika politik ataupun filsafat moral adalah yang menyangkut dimensi politis kehidupan manusia. Dan pokok permasalahan etika politik adalah pengakuan secara sah bagi kekuasaan yang dapat diwujudkan dalam pertanyaan dengan hak moral apa seseorang atau sekelompok orang yang memiliki dan menjalankan kekuasaan yang dimiliki? Betapapun besar kekuasaan seseorang, ia selalu dihadapkan pada permintaan atas tanggung jawab bagi pelaksanaan kekuasaan dan apabila pertanggungjawaban itu tidak diberikan, kekuasaan tersebut dinilai tidak sah.⁷⁴

Selanjutnya Aristoteles menjelaskan bahwa baik atau buruknya negara dinilai dari kesanggupan negara mencapai tujuan-tujuannya yakni mensejahterakan seluruh warga negara, sedangkan negara yang buruk adalah yang gagal melaksanakan cita-cita itu. Sementara menurut Rousseau negara harus selalu berusaha mewujudkan kehendak umum atau rakyat. Apabila negara melakukan hal yang sebaliknya, maka akan muncul kondisi krisis.⁷⁵ Kekuasaan dalam konteks negara dianggap sebagai perwujudan dari politik, yang dalam pelaksanaannya memerlukan pertanggungjawaban, sehingga diperlukan landasan etika. Artinya kekuasaan memerlukan legitimasi etis, agar kekuasaan itu dianggap sah, tentu saja selama negara dapat mencapai tujuannya yakni mensejahterakan warganya bila gagal, maka legalitasnya akan hilang.

⁷³A. Syafii Ma'arif, *Islam dan Politik di Indonesia*, (Yogyakarta: IAIN Kalijaga Press, 1988), 22.

⁷⁴Suseno, *Etika Politik Prinsip-Prinsip Moral...*, 30.

⁷⁵Ahmad Suhelmi, *Pemikiran Politik Barat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), 46.

Sementara dalam khazanah pemikiran politik Islam diakui bahwa para penguasa politik yang datang sesudah Rasulullah adalah para pengganti Rasulullah dalam memimpin komunitas Islam. Sama seperti Rasulullah kecuali dalam hal kedudukan Rasulullah sebagai penerima dan penyampai wahyu. Para penguasa politik itu kemudian lebih dikenal dengan khalifah. Ini juga merupakan pemegang mandat dari Allah untuk mewujudkan otoritas politiknya di atas bumi sebagaimana teori al-Mawardi.

Sungguh telah mengangkat seorang pemimpin yang menggantikan kedudukan Nabi bagi umatnya, yang memelihara agama dan memegang kekuasaan politik untuk menegakkan kaidah-kaidah agama dan mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia.⁷⁶ Al-Mawardi tidak saja memandang agama sebagai sendi dasar kekuasaan imamah atau khalifah merupakan otoritas pengganti kedudukan Rasulullah yang arahnya sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah, tetapi juga karena agama secara umum merupakan sendi dasar kekuasaan yang paling kokoh yang membangkitkan kepatuhan massa secara sukarela.⁷⁷

Pandangan yang sama juga dikemukakan oleh Hanna Mikhail sebagai salah satu pendukung pemikiran al-Mawardi menyatakan bahwa Islam tidak memisahkan masalah spiritual dan masalah dunia itu, Islam meliputi segala aspek termasuk politik, karena penentuan faktor sejarah Muhammad adalah seorang Nabi sekaligus pemimpin negara.⁷⁸ Islam sendiri sebagaimana pandangan R. Strothman menegaskan bahwa disamping merupakan sistem, agama merupakan sistem politik dan Nabi Muhammad yang juga seorang rasul merupakan pemimpin

⁷⁶ Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Shulthaniyyah*, 3.

⁷⁷ *Ibid.*, 151-153.

⁷⁸ Hanna Mikhail, *Politics and Revelation*, (Edinburgh: University Press, 1995), 15.

negara.⁷⁹ Dengan memperhatikan pandangan-pandangan tersebut, pada dasarnya kekuasaan itu membutuhkan landasan etis sebagai legalitas agar bisa dipertanggungjawabkan. Sedangkan menurut Haryatmoko, bahwa memang bisa saja kekuasaan diperoleh dengan kekerasan, kemudian hukum atau norma akan melegitimasi sesudahnya. Namun, kualitas legitimasi itu berpengaruh terhadap ketulusan dukungan warga negara. Kebutuhan akan legitimasi tindakan ini memberi peluang wacana normatif.⁸⁰

Politik sebagai perwujudan dari kekuasaan dalam suatu negara pelaksanaannya harus dilandasi dengan moralitas sesuai dengan nilai-nilai keagamaan, agar manusia jangan tenggelam dalam gejolak nafsu yang destruktif. Sehingga unsur paksaan dalam berpolitik tidak bisa disangkal lagi karena untuk menjaga kepentingan bersama masyarakat dan negara secara keseluruhan. Maka kekuasaan membutuhkan legitimasi moral selaras dengan nilai-nilai keagamaan yang ada, sebab secara umum agama merupakan sendi dasar kekuasaan yang paling kokoh yang mampu membangkitkan kepatuhan warga masyarakat dan negara secara sukarela.⁸¹ Dengan demikian etika politik pada dasarnya dapat disimpulkan sebagai landasan moral (etis) bagi pelaksanaan kekuasaan, karena dalam pelaksanaannya kekuasaan harus dipertanggungjawabkan, artinya kekuasaan harus mendapatkan legitimasi secara etis, tanpa hal itu kekuasaan dianggap tidak sah karena tidak mempunyai legalitas dan kekuasaan akan digunakan untuk menindas. Meskipun begitu ada yang berpandangan bahwa landasan moral (etis)

⁷⁹Gibb, Har, *Shorter Encyclopedia of Islam*, (Leiden: E.J. Brill, 1961), 534.

⁸⁰Haryatmoko, *Etika Politik dan Kekuasaan*, 1-2.

⁸¹A. Rahman Zaenuddin, *Kekuasaan dan Negara*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), 94.

itu merupakan kebenaran yang harus bersumber dari wahyu (agama).

Definisi tersebut akan digunakan untuk menelusuri pemikiran- pemikiran M. Natsir, seperti pemikirannya tentang dasar negara, demokrasi dan pelaksanaan *amar ma'ruf nahi munkar* sebagai upaya penegakan hukum dalam rangka mewujudkan keadilan, menjaga ketertiban masyarakat dan kedaulatan negara, sebab apabila ditinjau dari prespektif etika politik, akan memunculkan pertanyaan-pertanyaan mengapa negara harus berdasar agama, sebab adanya yang anggapan bahwa etika harus bersumber pada kebenaran yang berasal dari agama, agar kekuasaan negara itu legal dan tidak digunakan sewenang-wenang, sedangkan untuk mendapatkan kekuasaan dalam suatu negara harus didapatkan secara etis ya'ni melalui demokrasi, selanjutnya pelaksanaan *amar ma'ruf nahi munkar* sebagai sebagai upaya penegakan hukum yang bersumber pada kebenaran untuk mewujudkan keadilan yang mampu menjamin kepentingan seluruh lapisan masyarakat. Sehingga pemikiran M. Natsir tentang persoalan-persoalan tersebut dapat dinilai sebagai etika politik. Hal itu bisa digunakan sebagai pemandu dalam menelusuri pemikiran M. Natsir, untuk menemukan pemikirannya tentang etika politik.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Karakteristik penelitian ini terdapat pada objek yang menjadi fokus penelitian. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada segi kualitas secara alamiah, karena menyangkut penelitian konsep, nilai serta ciri-ciri yang

melekat pada objek penelitian,⁸² dalam hal ini menyangkut pemikiran M. Natsir tentang etika politik. Pada dasarnya metodologi yang dikembangkan oleh sejarawan intelektual juga diterapkan oleh para sejarawan pada umumnya. Dengan menggunakan metode deskriptif dan historis. Metode diskriptif adalah merupakan metode yang bertujuan untuk membuat gambaran mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian.⁸³ Disamping metode diskriptif juga historis, digunakan untuk menguraikan secara teratur seluruh konsepsi tokoh, kesinambungan historis untuk melihat benang merah yang bersifat eksternal maupun internal, serta untuk mengungkap makna yang dimaksud oleh tokoh tersebut dalam karyanya.⁸⁴ Kekhasannya terletak pada aspek mana dari masa lalu yang hendak diungkap, tidak pada kepemilikan eksklusif baik yang berkenaan dengan bukti atau teknik-teknik kajian.⁸⁵

Masa lalu itu sendiri telah terwujud dalam bentuk teks atau arsip. Itu membuat sejarawan dalam prakteknya adalah penafsir teks. Meskipun untuk sebagian besar jenis sejarawan, seperti Collini kemukakan, teks-teks ini hanya sarana yang diperlukan untuk memahami sesuatu selain dari teks itu sendiri. Bagi sejarawan intelektual pemahaman penuh atas teks yang mereka pilih dengan sendirinya adalah tujuan perburuan intelektual mereka.

Sejarah intelektual seringkali terlihat membawa fokus kajiannya pada studi tentang ide-ide ‘tinggi’ (*the high ideas*) dari periode masa lalu, yakni pemikiran para intelektual yang berpartisipasi dalam budaya terdidik di

⁸²Jerome Kick dan Mare L. Miller, *Reliability and Validity in Qualitative Research*, Vol. I, (Beverly Hills: Sage Publication 1986), 9.

⁸³Almasdi Syahza, *Metodologi Penelitian*, (Pekanbaru: Pusbangdik Universitas Riau, 2009), 25.

⁸⁴Anton Bakker dan Achmad Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1990), 63-65.

⁸⁵Stefan Collini, *What is Intellectual History?*, *History Today*, Volume 35, URL: <http://www.historytoday.com/stefan-collini/what-intellectual-history>.

masanya. Walaupun menjelaskan ‘ide-ide tinggi’ adalah yang utama, sejarawan intelektual dipastikan menemukan kemustahilan, bilamana penjelasan mengenai hal tersebut tidak memeriksa konteks sosial di mana ide-ide dimaksud berkembang. Dalam konteks ini sejarawan sosial tentu terlibat dalam ranah sejarah sosial. Disamping itu Michael Biddiss juga menegaskan, ‘Setiap survei umum sejarah intelektual sekarang harus mempertimbangkan tidak hanya ide-ide politik dan sosial, tetapi juga dari interaksi mereka dengan perkembangan ilmu pengetahuan alam, filsafat dan pemikiran agama serta seni.’⁸⁶ Dengan begitu dapat diketahui bagaimana pemikiran M. Natsir muncul, merupakan ide-ide tinggi (the high ideas) pada periode masa lalu, karena peranannya sebagai tokoh yang tidak akan terlepas dari latar belakang pendidikan, kondisi sosial politik saat itu, juga pemahamannya terhadap agama (Islam) berkaitan dengan politik yang pada akhirnya melahirkan pemikirannya tentang etika politik.

Maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, adalah pendekatan sejarah intelektual. Sejarah intelektual adalah “studi tentang pikiran-pikiran masa lalu” (*the study of past thoughts*), kata Quentin Skinner.⁸⁷ Ia berusaha memahami “ide-ide, pikiran, argumen, keyakinan, asumsi, sikap dan perilaku yang secara bersama-sama menyusun kehidupan reflektif atau intelektual masyarakat lampau” (*ideas, thoughts, arguments, beliefs, attitudes, and preoccupations that together made up the intellectual of reflective of previous societies*), demikian Collini menyatakan.⁸⁸ Hal yang senada disampaikan oleh Bruce bahwa sejarawan intelektual menekankan studi mereka pada “pentingnya kesadaran atau ide-ide dalam memahami masa lalu” (*the importance of consciousness or ideas in*

⁸⁶Collini, *What is Intellectual History? History Today*, Volume 35.

⁸⁷*Ibid.*

⁸⁸*Ibid.*

understanding the past).⁸⁹ Jadi pada dasarnya problematisasi isu yang diangkat oleh sejarawan intelektual tidak akan terlepas dari konsep ide atau kehidupan intelektual di masa lalu.

2. Pembatasan dan Obyek Penelitian

Obyek penelitian ini fokus pada pandangan M. Natsir mengenai etika politik, sedangkan obyek penelitian dibedakan antara lain:

- a. Obyek material adalah hal-hal yang menyangkut kajian sekaligus menunjukkan ruang lingkup penelitian ilmu tersebut, dalam penelitian ini sebagai obyek materialnya adalah pemikiran M. Natsir tentang etika politik.
- b. Obyek formal, adalah sejarah pemikiran ataupun sejarah intelektual, karena sesuai dengan karakternya sebagai bagian dari sejarah, permasalahan yang diteliti oleh para sejarawan intelektual tidak akan keluar dari masa lalu. Tepatnya, sejarah intelektual adalah “studi tentang pikiran-pikiran masa lalu” (the study of past thoughts).⁹⁰ Sehingga obyek formalnya dalam penelitian ini adalah sejarah pemikiran ataupun sejarah intelektual.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Penelusuran data kepustakaan
Pengumpulan data dengan menelusuri beberapa karya-karya ilmiah M. Natsir sebagai sumber data primer yang berhasil dilacak oleh penulis sejumlah 34 buah, juga sejumlah karya orang lain mengenai sosok

⁸⁹ *Ibid.*

⁹⁰ Heddy Shri Ahimsa-Putra, “Paradigma, Epistimologi, dan Metode Ilmu Sosial Budaya (Sebuah Pemetaan)”. *Makalah* disampaikan dalam ...”

M. Natsir berkaitan dengan pemikirannya, yang tidak dapat di sebutkan secara pasti, karena studi tentang pemikiran tokoh ini tetap menarik bagi banyak tokoh ilmuwan maupun peneliti.

- b. Sumber data sekunder yakni data yang dikumpulkan dengan cara mengumpulkan dokumen atau naskah-naskah yang berkaitan dengan pernyataan politik M. Natsir. Selain itu sebagai data sekunder, informasi yang dipakai diperoleh dari buku-buku, dokumen, media cetak, ayat-ayat al-Qur'an dan al-Hadis yang terkait.

4. Analisa

Untuk menelaah dalam penelitian ini sebagai praktek analisis, paling tidak ada dua langkah utama yang bersifat integratif, yakni (1) membaca (reading) dan (2) menafsirkan (interpreting). John Burrow menawarkan dua analogi yang dapat dipergunakan untuk menggambarkan kedua langkah tersebut, yaitu (1) 'mendengarkan' percakapan (the 'eaves dropping' on a conversation) dan (2) penerjemahan (a translation).⁹¹

Adapun yang pertama, yakni menguping percakapan, menurut Burrow, mempraktekkan sejarah intelektual tidak membutuhkan pengetahuan tentang sebuah model atau resep, melainkan hanya kesabaran, kewaspadaan dan ketekunan dalam memelihara perhatian kita pada percakapan masa lalu dan mencoba memahami komponen-komponen dengan konteksnya. Sedangkan yang kedua, yakni penerjemahan, memikirkan pemikiran masa lalu yang ditawarkan sejarah intelektual sebagai aktivitas 'menciptakan kembali' (*recreating*) atau 'mengalami kembali' (*reexperiencing*) hanyalah setengah dari proses. Seandainya mungkin, proses ini seolah-olah hendak

⁹¹Burrow, *Intellectual History in English Academic Life: Reflections on a Revolution*, (Hampshire & NY: Palgrave Macmillan), 8-24.

menambah satu orang yang secara restropektif melakukannya ke dalam populasi masyarakat masa lalu tersebut. Intinya adalah agar dapat berbicara tentang hal itu, untuk menjadi perantara dua dunia.⁹²

Dalam melakukan analisis, ada dua hal penting yang patut diperhatikan, yaitu (1) relasi antar teks dan konteks, dan (2) hubungan antara sejarah dan teori. Menurut Dominick La Capra,⁹³ sejarawan harus mempertimbangkan kedua hal tersebut sebagai sesuatu yang vital dalam upaya mereka membaca dan menafsirkan. Teks dapat dilihat sebagai peristiwa sejarah berkenaan mereka sendiri serta sebagai dasar penting untuk rekonstruksi inferensial peristiwa-peristiwa lainnya. Sementara itu, konteks biasanya jamak dan karena itu sering selalu bertentanga, atau setidaknya delematis terkait satu sama lainnya. Maka dari itu menjadi sangat penting bagi para sejarawan untuk mampu menjaga etika dalam karya-karyanya.

Akhirnya dengan melakukan analisa sebagaimana yang telah diungkapkan di atas, seperti kemampuan membaca dan menafsirkan kembali seuai denganteks dan kontkes berkaitan peristiwa ataupun sejarah dalam kehidupan M. Natsir pada masa lalu, diharapkan mampu mengungkap pemikirannya tentang etika politik.

G. Sistematika

Penelitian ini terdiri dari enam bab termasuk bab penutup, yang terangkai sebagai suatu kesatuan yang utuh, antara bab satu dengan bab lainnya. Komposisi masing-masing bab diuraikan pada sistematika sebagai berikut:

Bab Pertama. Berisi Pendahuluan memuat dasar-dasar yang memunculkan permasalahan yang menggambarkan

⁹²Santosa, *Sejarah Intelektual Sebuah Pengantar*, (Sidoarjo: Uru Anna Books, 2014), 68.

⁹³La Capra, *Intellectual History and Its Ways*, *The American History Review*, Vol. 97 No. 2, April 1992, 425-439.

secara sekilas sejarah perjalanan M. Natsir sebagai intelektual dan politikus, serta pemimpin umat dalam aktivitasnya pada bidang politik, organisasi sosial kemasyarakatan dan dakwah. Serta rumusan masalah yang masih bersifat umum tersebut dibatasi menurut obyek studi. Kemudian tujuan dan kegunaan penelitian. Kajian pustaka yang merupakan *prior research*, untuk mengetahui bahwa penelitian ini belum pernah dilakukan. Dilanjutkan kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua. Berisi kehidupan M. Natsir yang membahas seputar sejarah kelahiran, aktivitasnya dalam organisasi sosial keagamaan dan dunia politik, serta karya-karya ilmiahnya.

Bab Ketiga. Berisi kehidupan sosial dan politik, baik sebelum maupun sesudah kemerdekaan.

Bab Keempat. Berisi pokok-pokok pemikiran M. Natsir yang mengulas tentang karakteristik pemikirannya tentang politik, etika politik menyangkut masalah dasar negara, demokrasi serta pemikirannya tentang *amar ma'ruf nahi munkar*.

Bab Kelima. Berisi kontribusi pemikiran M. Natsir dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, yang mengetengahkan tentang kontribusi pemikirannya tentang etika politik di Indonesia, baik sebelum maupun pasca kemerdekaan. Dari sumbangannya tersebut dapat diketahui adakah relevansi pemikirannya, disebabkan terdapat keterkaitan antara kehidupan sosial dan politik serta kontribuasinya pada masa-masa itu, sehingga penelitian ini masih relevan dengan kondisi sosial politik di Indonesia.

Bab Keenam. Penutup, yang berisi kesimpulan sebagai hasil akhir, yang memaparkan tentang hasil kajian terhadap konsep pemikiran tokoh tersebut yang diakhiri dengan saran-saran ataupun rekomendasi.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melalui kajian secara mendalam terhadap konsep pemikiran M. Natsir tentang etika politik, maka pada akhirnya dapat disampaikan hasil akhir dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi M. Natsir etika politik merupakan landasan etis bagi kekuasaan, oleh karena itu landasan etik tersebut menurutnya berupa kebenaran yang bersumber pada agama, meskipun begitu baginya pendasaran agama terhadap negara tidak mutlak, karena keberadaan negara tidak tergantung pada agama.
2. Faktor yang mendorong munculnya pemikiran M. Natsir tentang etika politik tersebut, karena dilatarbelakangi oleh kondisi kehidupan sosial politik pada waktu itu, yakni rivalitas yang terjadi antara golongan Islam diwakili oleh M. Natsir, sedangkan golongan Nasionalis Sekuler oleh Soekarno yang terjadi sekitar tahun 1930-an dan berlanjut pada penghujung tahun 1940-an, menyangkut pemisahan antara negara dan agama.
3. Kontribusi pemikiran M. Natsir tentang etika politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dapat diperhatikan keterlibatannya pada aktivitas politik dan perjuangannya serta sumbangan pemikirannya sewaktu zaman penjajahan sekitar pada awal tahun 1930-an, berlanjut dipenghujung tahun 1940-an, menyangkut persoalan penyatuan negara dan agama serta pelaksanaan demokrasi pemikirannya tentang pelaksanaan *amar ma'ruf nahi munkar* sebagai upaya untuk menegakkan Islam dari serangan pihak-pihak yang ingin memojokkan Islam, juga sikapnya dalam menghadapi kristenisasi yang dibantu oleh penjajah.

Sedangkan dimasa Soekarno bisa dilihat keterlibatan dalam aktivitas politik dan perjuangannya seperti sikapnya yang kompromistis dalam menerima Pancasila sebagai dasar negara, setelah perjuangannya di Majelis Konstituante lewat kendaraan politiknya Masyumi meskipun tidak berhasil, juga perlawanannya terhadap demokrasi terpimpin yang diperlakukan oleh Soekarno karena dinilai otoriter. Pada masa pemerintahan Soeharto, bisa diperhatikan sikapnya dalam menghadapi kristenisasi yang sasarannya mantan anggota G.30.S\PKI yang dinilai menyinggung umat Islam, dengan mencari solusi yang diterima semua pihak. Serta koreksinya terhadap buku pelajaran moral Pamcasila (PMP) yang dinilai membahayakan bagi generasi muda, karena akan menimbulkan pendangkalan aqidah, dan keterlibatannya dalam Petisi 50 sebagai wujud keprihatinannya dalam penegakan demokrasi, karena pemeritahan Orde Baru dibawah kepemimpinan Suharto dinilai sewenang-wenang dalam pelaksanaan demokrasi. Semua itu merupakan kontribusi pemikirannya terkait dengan etika politik.

4. Dari apa yang telah diungkapkan diatas, baik kontribusinya pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada masa-masa sebelum kemerdekaan maupun setelah kemerdekaan baik dimasa Soekarno maupun Soeharto, dengan memperhatikan realitas kondisi kehidupan sosial dan politik pada waktu itu, aktifitas politik serta kontribusi pandangannya mengenai etika politik, maka terdapat keterkaitan diantara keduanya. Sehingga pandangannya mengenai etika politik masih relevan dengan kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

B. Saran-saran

Sehubungan dengan hasil penelitian terhadap konsep pemikiran M. Natsir tentang etika politik yang menyangkut persoalan-persoalan dasar negara, demokrasi dan pelaksanaan *amar ma' ruf nahi munkar* sebagai upaya untuk menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya, maka penulis menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Dengan memahami konsep pemikiran M. Natsir tentang etika politik tersebut, diharapkan mampu memberikan pemahaman, bahwa dasar negara Pancasila dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sudah final, karena melihat realitas dan kondisi bangsa Indonesia yang majemuk.
2. Pelaksanaan demokrasi sebagai salah satu wujud dalam melaksanakan hak-hak politik bagi masyarakat, harus dilakukan dengan cara-cara yang jujur, bebas, transparan, santun dan sesuai dengan hati nurani, serta menghindari cara-cara yang tercela seperti money politik, yang akan berakibat pada biaya politik tinggi, pada akhirnya akan menimbulkan banyaknya kasus korupsi seperti sekarang ini, juga menghindari cara-cara kekerasan dan memaksakan kehendak, dengan upaya penegakkan hukum sebagai upaya untuk mencegah korupsi dan tindakan kekerasan dalam kehidupan masyarakat, serta menjaga kedaulatan negara.
3. Dengan memahami konsep pemikiran M. Natsir diatas, diharapkan agar setiap warga negara dalam mencapai tujuannya harus menggunakan cara-cara yang sesuai dengan konstitusi ataupun undang-undang. Dilakukan secara demokratis, bukan melalui pemaksaan kehendak, sebagaimana yang terjadi akhir-akhir ini, sementara adanya kekhawatiran beberapa pihak, munculnya ancaman terhadap Pancasila, NKRI, dan gerakan-gerakan radikal, dengan menyalahgunakan agama

(Islam) sebagai atributnya, padahal sebagai agama (Islam) tidak pernah mengajarkan tindakan kekerasan. Bahkan mengajak masyarakat untuk membangun kehidupan yang dilandasi kasih sayang, ditengah-tengah suasana kemajemukan masyarakat Indonesia. Sehingga terwujud harmonisasi dalam kehidupan masyarakat yang dapat memberikan kontribusi dalam rangka membangun kehidupan sosial yang sejahtera serta dipenuhi dengan ketentraman dan kedamaian.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Masykuri, *Demokrasi dipersimpangan makna: respon intelektual muslim Indonesia terhadap konsep demokrasi (1966-1993)*, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 1999.
- Abdullah, M. Amin, *Islamic Studies di Perguruan Tinggi Pendekatan Integratif Interkoneksi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Abdoerraoef, *Al-Qur'an dan Ilmu Hukum*, Jakarta: Bulan Bintang, 1971.
- Ahimsa-Putra, Heddy Shri, "Paradigma, Epistimologi, dan Metode Ilmu Sosial Budaya (Sebuah Pemetaan)". *Makalah disampaikan dalam...*
- Ahmad, Rafiq, *Fiqh Kontekstual*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Ahmad, Zainal Abidin, *Konsepsi Negara Bermoral Menurut Imam Al-Ghazali*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- _____, *Republik Islam Demokratis*, Tebing Tinggi, Deli: Pustaka Maju, 1951.
- Ali, A. Mukti, *Beberapa Persoalan Agama Dewasa ini*, Jakarta: Rajawali Press, 1998.
- Al-Kindi, *Rasa'il al-Kindi al-Falsafiya*, Muhammad Abd al-Hadi Abu Ridha (ed.), Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabiyy, 1950.
- Al-Maududi, Abu al-'A'la, *Hukum dan Konstitusi-Sistem Politik Islam*, Bandung: Mizan, 1990.
- Al-Mawardi, *Tashil al-Nazar wa Ta'jil al-Zafaar*, al-Nahdah al-Misriyyah, (Beirut, 1981).

- Al-Sufi , Abd al-Qadir, *Resurgent Islam 1400 H*, Norwich: Diwan Press, 1979.
- Al-Syahrastani, Muhammad Ibnu Abd al-Karim, *al-Milal wa al-Nihal*, edisi M.S Kailani, Beirut: Dar al-Ma'arif, 1975.
- Amal, Ichlasul, *Regional and Central Goverment in Indonesian Politics: West Sumatra and South Sulawesi 1949-1979*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1992.
- Amin, S.M., *Indonesia di Bawah Rejim Demokrasi Terpimpin*, Jakarta: Bulan Bintang, 1968.
- Anshari, Endang Syaifuddin dan Amien Rais, *Pak Natsir 80 Tahun: Buku Pertama, Penghargaan dan Penghormatan Generasi Muda*, Jakarta: Media Dakwah, 1988.
- Anshari, Endang Syaifuddin, *Pak Natsir 80 Tahun: Buku Kedua, Penghargaan dan Penghormatan Generasi Muda*, Jakarta: Media Dakwah, 1988.
- Ansor, Muhammad, "Politik Pelembagaan Syariat: Strategi dan Argumentasi PPP, PBB dan PKS di Sidang Tahunan MPR 1999-2002", *Ulumuna*, Volume IX Edisi 16 Nomor 2 Juli-Desember 2005.
- Anwar, Rosihan, *Pergerakan Islam danKebangsaan Indonesia*, Jakarta: Kartika Tama, 1971.
- Aranandt, H.W. (ed.), *Pembangunan dan Pemerataan: Indonesia di Masa Orde Baru*, Bandung: Pustaka Sa'man, 1981.
- Bagus, Lorens, *Kamus Filsafat*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1996.

- Bakker, Anton dan Achmad Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1990.
- Bellah, Robert N., *Religion and Progress in Modern Asia*, London: Collier McMilk, 1965.
- _____, *Beyond Belief: Essays on Religion in a Post Traditionalist World*, Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1991.
- Benda, Harry J., *Bulan Sabit Matahari Terbit*, Terj. Dhakidae, Jakarta: Pustaka, 1980.
- Bertens, K., *Etika*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1994
- Blum, William T., *Theories of the Political Systems Classics of Political Thought and Modern Political Analysis*, Third Edition, N.J. Prentice Hall: Englewood Cliffts, 1978.
- Brannen, Julia, *Memadu Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Budiardjo, Miriam, *Partisipasi dan Partai Politik*, Jakarta: Gramedia, 1981.
- _____, *Konsep Kekuasaan*, Tinjauan Kepustakaan, (ed) Aneka Pemikiran tentang Kuasa dan Wibawa, Jakarta: Sinar harapan, 1984.
- Burns, Peter, *Revelation and Revolution: Natsir and the Pancasila*, Townsville: Southeast Asian Monograph Series No.9, Committee of South-East Asian Studies, James Cook University of North Queensland, 1981.
- Collini, Stefan, *What is Intellectual History?*, *History Today*, Volume 35, URL: <http://www.historytoday.com/stefan-collini/what-intellectual-history>.

- Chehabi, H.E., *Iranian Politics and Islamic Modernism: The Liberation Movement of Iran Under Shah and Khomeini*, London: I.B. Tauris and Co. Ltd. 1989.
- Crouch, Harold, *Militer dan Politik*, Jakarta: Sinar Harapan, 1988.
- Dahl, Robert A., *Dilemma of Pluralist Democracy*, New Haven dan London: Yale University Press, 1982.
- Dasuki, H. A. Hafizh, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT. Ikhtiar Baru van Hoeve, 1999.
- Duverger, Maurice, *Partai-partai Politik dan Kelompok-kelompok Penekan*, Jakarta: Bina Aksara, 1981.
- Dzulfikriddin, M, *M. Natsir Dalam Sejarah Politik Indonesia*, Bandung, Mizan, 2010.
- Echols, John M. dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1975.
- Effendy, Bahtiar, *Islam dan Negara, Tranformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, Jakarta: Paramadina, 1998.
- Al-Farabi, *The Attainment of Happiness dalam Muhsin Mahdi., Al-Farabi's Philosophy of Plato and Aristotle*, New York: The Free of Glencol, 1962.
- Fatwa, A.M., *Demokrasi teistis: upaya merangkai integrasi politik dan agama di Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Federspiel, Howard, *Persatuan Islam: Islamic Reform in Twentieth Century Indonesia*, Ithaca: Modern Indonesian Project, Southeast Asia Program, Cornell University, 1970.

Feith, Herber, *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*, Cornel University Press, Ithaca, 1964.

Gaffar, Afan, *Javanese Voters, a Case Study of Election under a Hegemony Party System*, Yogyakarta. UGM Press, 1992.

Gholly, Buthros Buthros, *al- Madkhol fi Ilmi al- Siyasa*, Kairo: Maktabah al-Anjalu al-Misriyah, 1976.

Anhar Gonggong, *Tragedi di Tengah Krisis Transisional dalam M. Natsir di Panggung Sejarah Republik*, (ed Lukman Hakim), Jakarta: Republika, 2008.

Hakim, Lukman (ed), *M. Natsir di Panggung Sejarah Republik*, Republika: Padang, 2008.

_____, *70 Tahun H. Buchari Taman: Menjawab Panggilan Risalah*, Jakarta: Media Dakwah.

Harjono, Anwar, Tarmizi Taher, dkk, *Pemikiran dan Perjuangan M. Natsir*, Jakarta, Pustaka Firdaus, 1996.

Haryatmoko, *Etika Politik dan Kekuasaan*, Jakarta: Kompas, 2009.

Hasan, Ahmad *Bible Lawan Bible*, (Bangil: Lajnah Penerbitan Pesantren Persis, 1984)

Hasan, Ahmad, *Islam dan Kebangsaan*, Bangil: Lajnah Penerbitan Pesantren Persis, 1984.

_____, *The Doctrine of Ijma' in Islam*, Islamabad: Islamic Research Institute, 1976.

Hatta, Mohammad, *Demokrasi Kita*, Jakarta: Panji Masyarakat, 1959.

Hook, Sidney, *Democracy*. dalam *Encyclopaedia Americana*, Deanbury dan Connecticut: Grolier Incorporated. 1984.

- Husin, Asna, *Philosophical and sociological aspects of da'wah. A study of the Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia*, US: Columbia University, 1998.
- Ibn Miskawaih, al-Fawz al-Asqhar, *Dar al-Maktabat al-Haya*, Beirut, t.t.
- _____, *Tahdhib al-Akhlaq*, Syekh Hasan Tamir (ed), Mahdawi, Beirut, 1398.
- Ibn Sina, *Risala fi 'Ilm al-Akhlaq* dalam Majid Fakhry (ed).
- Ibnu Khaldun, Abd ar-Rahman, Ibnu Muhammad, Ibnu Hasan, Ibnu Ibrahim, Ibnu Abdar Rahman, *Muqaddimah al-Musanna*, Baghdad, t.t..
- Imarah, Muhammad, *Al-Islam wa al-Sulthah al-Diniyah*, (Kairo: Dar al-Thaqafah al-Jadidah, 1979
- _____, *Fundamentalisme dalam Perspektif Pemikiran Barat dan Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- Imawan, Riswandha, "Golkar: Cita-Cita dan Realita", Andreas Pandiangan (ed.), *Menggugat Kemandirian Golkar*. Yogyakarta: BIGRAF Publishing, 1996.
- Jameelah, Maryam, *Islam and Modernism*, Lahore: Islamic Publication, 1977.
- Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif bidang Filsafat*, Yogyakarta: Paradigma, 2005.
- _____, *Negara Kebangsaan Pancasila*, Yogyakarta: Paradigma, 2013.
- Kahin, George Mc. T., *Nationalism and Revolution in Indonesia*, Itacha, Cornell University Press, 1952.

Khan, Qomaruddin, *Political Concept in the Qur'an*, Lahore: Islamic Book Foundation, 1982.

Konflik Sosial Bernuansa Agama di Indonesia, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Beragama Badan Ditbang Agama Diklat Keagamaan, Departemen Agama RI, 2002.

Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yogyakarta: Yayasan Bintang Buaya, 1997.

Latif, Yudi, *Negara Paripurna, Historitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila*, Jakarta: Gramedia, 2011.

Liddle, William, *Partisipasi Partai Politik Indonesia pada Masa Awal Orde Baru*, Jakarta: Grafiti Pers, 1992.

Lipson, Laslie, *The Great Issues of Politic on Introduction to Political*, Berkley: University of California, 1997.

Lubis, Mohammad Ali Hanafiah, *Kompromi Dasar Negara*, Medan: t.p, 1988.

Luth, Thohir, M. Natsir, *Dakwah dan Pemikirannya*, Jakarta: Gema Insani, 1999.

Ma'arif, A. Syafii, *Islam dan Masalah Kenegaraan (Studi tentang Percaturan dalam Konstituante)*, Jakarta: LP3ES, 1985.

_____, *Islam dan Politik di Indonesia*, Yogyakarta: IAIN Kalijaga Press, 1988.

_____, *Islam, Politik dan Demokrasi di Indonesia*, dalam Basco Carvallo dan Dasrizal (eds.), *Aspirasi Umat Islam Indonesia*, (Jakarta: Leppenas, 1983).

_____, *"Islam as the Basic of State: A Study of the Islamic Ideas Political Ideas as Reflected in the Constituent*

Assembly Debates in Indonesia,” (disertasi doktor, University of Chicago: 1983.

Madiner, Remy, Partai Masjumi (Antara Godaan Demokrasi dan Islam Integral), Bandung: Mizan, 2013.

Madjid, Nurcholish, *Cita-Cita Politik Islam Pasca Reformasi*, Jakarta: Paramadina, 1999.

_____, *Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemoderenan*. Jakarta: Paramadina, 1992.

Mahendra, Yusril Ihza, *Modernisme dan Fundamentalisme: Perbandingan antara Masyumi dan Jama ‘at al-Islami Pakistan*, Jakarta: Penerbit Paramadina, 1999.

Mahendra, Yusril Ihza. “Modernisme dan Demokrasi: Pandangan Politik M. Natsir”, *Islamika* No. 3, Januari-Maret 1994

Makka, A. Makmur dan Dhurorudin Mashad, *ICM1: Dinamika Politik Islam di Indonesia*, Jakarta: CIDESINDO, 1996.

Marbun, B.N., *Kamus Politik*, Cet. 1, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996.

Mas’ud, Mochtar, *Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru 1966-1971*, Jakarta: LP3ES, 1989.

Maulida, Irsandy, *Pemikiran Politik Muhammad Natsir Mengenai Dasar Negara*, Fisip-Universitas Siliwangi.

Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Karya, 1989.

Mikhail, Hanna, *Politics an relevation*, Edinburgh University Press, 1995.

Mime, R.S., *Teknokrat dan Poiltik di Negara-Negara Asia Tenggara*, dalam Prisma, No. 3, Maret, 1984

Muhadjir, Noeng, Prof. Dr. H, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998.

Naim, Muchtar, “Menyongsong 50 Tahun Indonesia Merdeka dan Mengenang M. Natsir”, *Media Dakwah*, 1996.

Natsir, M., *Islam Mempunyai Sifat-Sifat Yang Sempurna Untuk Dasar Negara*, Jakarta: dalam *Risalah Abadi*, edisi 12 September 1957.

_____, *Islam sebagai Landasan Negara*, Bandung: Pimpinan Fraksi Masyumi dalam Konstituante, 1957.

_____, *Kubu Pertahanan Umat Islam Dari Masa ke-Masa*, Surabaya: t.p, 1964.

_____, *Pendidikan, Pengorbanan, Kepemimpinan, Primordialisme dan Nostalgia*, Jakarta: Media Dakwah, 1987.

_____, “Islam, Khatolik, Pemerintah” dalam *Islam dan Kristen di Indonesia*, Jakarta: Media Dakwah, 1983.

_____, *Dakwah dan Pembangunan*, Jakarta: Media Dakwah, 1978.

_____, *Demokrasi di Bawah Hukum*, Jakarta: Media Dakwah, 1986.

_____, “Hendak ke Mana Anak-anak Kita Dibawa Oleh PMP”, dalam *Panji Masyarakat*, No: 348, Rabiul Awal 1402 H.

_____, “Mencari Modus Vivendi antarumat Beragama di Indonesia”, Jakarta: *Media Dakwah*, 1980.

_____, *Capita Selecta*, Jakarta: Bulan Bintang, 1973.

_____, *Fiqhud Dakwah*, Solo: CV. Ramadhani, 1965

_____, *Pedoman Perdjoengan Masjumi: Partai Politik Islam Indonesia*, Jakarta: Dokumen Masjumi, 1946.

Noer, Deliar, *The Modernist Muslim Movement in Indonesia 1900-1942*, Oxford, New York and Jakarta: Oxford University Press, 1978.

_____, *Gerakan Modern Islam 1900-1942*, Jakarta: LP3ES, 1998.

_____, *Ideologi Politik, dan Pembangunan* Jakarta: Yayasan Perkhidmatan, 1983.

_____, *Partai Islam di Pentas Nasional 1945-1965*, Jakarta: Grafiti Press, 1987.

_____, *Pengantar Ke Pemikiran Politik*, Jakarta: CV. Rajawali, 1983.

Officiel Verslag Debat Antara Pembela Islam dan Ahmadiyah Qadian 1933, Jakarta: Penerbit Sinar Islam, tanpa tahun.

Palombara, Joseph La dan Myron Weiner, *Political Parties and Political Development*, Princeton University Press, 1966.

Pratiknya, Watik. *Percakapan Antar Generasi, Pesan Seorang Bapak*, Jakarta: Media Dakwah, 1989.

Puar, Yusuf A., M. Natsir *70 Tahun, Kenang-Kenangan Kehidupan Perjuangan*, Jakarta: Pustaka Antara, 1978.

R. William Liddle, "Soeharto's Indonesia: Personal Rule and Political Institutions", *Pacific Affairs*, Vol. 58, No. 1, Spring 1985.

Rahman, Fazlur, *Islam*, New York, Chicago, San Fransisco: Holt, Reinhart, Winston, 1966.

———, *Islam and Modernity, An Intellectual Transformation*, (Minneapolis: Bibliotheca Islamica, 1979.

Rahmat, Jalaluddin, *Islam dan Demokrasi*, dalam Murnis Suseno, dkk., *Agama dan Demokrasi*, Jakarta: Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat, 1992.

Rais, M. Amin, “Beberapa Catatan Kecil tentang Pemerintahan Islam”, dalam bukunya, *Cakrawala Islam Antara Cita dan Fakta*, Bandung: Mizan, 1992.

Rusli, Mohammad Ris'an, *Pemikiran Teologi M. Natsir*, Jakarta: 1998.

Saefuddin, AM. *Ijtihad Politik Cendekiawan Muslim*, Cet. 1, Jakarta: Gema Insani Press, 1999.

Salam, Solihin, *Wajah Nasional*, Jakarta: Pustaka Studi dan Penelitian Islam, 1990.

Schumpeter, Joseph A., *Capitalism. Socialism, and Democracy*, London: George Allen & Unwin Ltd., 1943.

Shadily, Hasan, *Ensiklopedi Indonesia*, Jilid VI. Edisi Khusus, Jakarta: PT. Ihtiar Baru Van Hoeve, 1992.

Shorter, *Encyclopedia of Islam*, E.J. Brill, Leiden, 1961.

Sjadzali, B. Munawir, *Islam Realitas Baru dan Orientasi Masa Depan Bangsa*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1993.

Sjahrir, *Refleksi Pembangunan: Ekonomi Indonesia 1968-1992*, Jakarta: Gramedia, 1992.

Soekarno, *Nationalism, Islam and Marxism*, translated by Karel H. Warouw and Peter D. Weldon, with an introduction by Ruth McVey, Ithaca: Modern Indonesian Project, Southeast Asia Program, Cornell University, 1984.

Sualman, Arif Hizbullah, *M. Natsir (1908-1993): His Role in the Development of Islamic Da'wah in Indonesia (Historical Study of an Indonesian Mujahid Da'wah)*, Malaysia: International Islamic University Malaysia, 1995/1996.

Sugiyono, Prof. Dr., *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R n D*, Bandung: Alfabeta, 2006.

Suhelmi, Ahmad, *Pemikiran Politik Barat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.

Suminto, H. Aqib, *Politik Islam Hindia Belanda*, Jakarta: LP3ES, 1985.

Suny, Isma'il, *Modernisme Demokrasi Pancasila*, Jakarta: Aksara Baru, 1987.

Suryadinata, Leo, *Golkar dan Militer: Studi tentang Budaya Politik*, Jakarta: LP3ES, 1995.

Suseno, Frans Magnis, *Etika Politik (Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern)*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1994.

_____, *Filsafat Kebudayaan Politik*, Jakarta: Gramedia Utama Pustaka, 1995.

_____, *Model Pendekatan Etika*, Yogyakarta: Kanisius, 1997.

Syahza, Almasdi, *Metodologi Penelitian*, Pekanbaru: Pusbangdik Universitas Riau, 2009.

Taylor, Paul W., "Introduction: What is Morality" dalam Paul W Taylor (ed), *Problems of Moral Philosophy an Introduction to Ethics*, California: Dickenson Publishing Company Inc. California, 1967.

Thaba, Abdul Azis, *Islam dan Negara Dalam Politik OrdeBaru*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Tibi, Bassam, *The Crisis of Modern Islam: A Preindustrial Culture In The Science Technological Age*, Salt Lake City: The University of Utah Press, 1988.

Ujang, Zainni. "Pak M. Natsir Ibarat Mutiara Alam Melayu" dalam Utusan Malaysia, Selasa, 9 Februari 2003.

Wertheim, W.F., "Islam Befare and After the Election," Oey Hong Lee (ed.), *Indonesia after the 1971 Elections*, London and Kuala Lumpur: Hull Monograph Series No. 5, Oxford University Press, 1974.

Yahya, Abi Zakaria Ibn Syarif al-Nawawi, *Riyaadlush Al-Shoolihin*, Beirut: Daru-Al-Ilmi, 1970.

Zainuddin, A. Rahman, *Kekuasaan Dan Negara*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992.

Majalah dan Koran

Al Lisan Nomor 25, Mei 1938.

Anderson, Benedict R.O'G, "Old State, New Society: Indonesia's New Order in Comparative Historical Perspective, " *Journal of Asian Studies*, Vol. XLII, No. 3, May 1983.

Arief Budiman. *The Emergence of Bureaucratic Capitalist State in Indonesia*, Lim Tech Ghee (ed), *Reflections on Development in Southeast Asia*, Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.1988.

Islamika, Jakarta, Nomor 3 Januari-Maret, 1994.

Majalah *Topik*, nomor 17 tahun XI Maret 1982. Kasman Singodimejo adalah anggota PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) yang mengesahkan UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945.

M. Natsir, *Islam Mempunyai Sifat-Sifat Yang Sempurna Untuk Dasar Negara*, (Jakarta: dalam *Risalah Abadi*, edisi 12 September 1957).

Panji Islam No. 20, 20 Mei 1940; No. 21, 27 Mei 1940; No. 23, 10 Juni 1940; No. 24, 17 Juni 1940; No. 25, 24 Juni 1940; dan No. 26, 1 Juli 1941.

Pos Indonesia, 2 Juni 1959.

Singodimejo, Kasman *Menyembuhkan Luka-Luka Lama*, Majalah *Topik*, nomor 17 tahun XI Maret 1982.

Suara Merdeka, 11 November 2013, 13 November 2015, 17 Desember 2015, 10 Mei 2017.

Jurnal

C. Schmitler, Philippe dan Terry Karl, dalam *Jurnal of Democracy* Vol. 2. No. 3 New York, 1991.

Firdaus, Abdullah, Omar, Mohd. Nasir dan Idris Zakaria, *Pemikiran Politik dan Kenegaraan M. Natsir*, *International Journal of Islamic Thought*, Vol.7: June 2015.

Liddle, R. William, "Soeharto's Indonesia: Personal Rule and Political Institutions", *Pacific Affairs*, Vol. 58, No. 1, Spring.1985.

M. Natsir, *Hendakke Mana Anak-anak Kita Dibawa Oleh PMP*, dalam Panji Masyarakat, No: 348, RabiulAwal 1402 H.

Dokumen

Anggaran Dasar *Masyumi* (1952), pasal 2 dan pasal 96.

Bayasut, S.U., (ed), *Fakta Dokumenta Kembali ke UUD 1945: Gagasan dan Tantangan*, Jakarta: Kementerian Penerangan, 1959.

Dasar Negara di Konstituante, Bandung: Sekretariat Konstituante RI Jilid III, 1959.

Departemen Kehakiman, R.I. *Sekitar Pembentukan Undang-Undang Perkawinan beserta Peraturan Pelaksanaannya*, Jakarta: Ditjen. Hukum dan Perundang-Undangan.1974.

Draf Konstitusi Republik (Islam) Indonesia, pasal 49 ayat3.

Draf Konstitusi Usulan Masyumi, pasal 1 pasal 12, pasal 134 dan pasal 97-110.

Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, Jakarta: Kementerian Penerangan, 1959.

M. Natsir, *Islam sebagai Dasar Negara*, Pimpinan Fraksi Masyumi dalam Konstituante, Bandung, 1957.

Mangkusasmito, Prawoto, “Masyumi dan Undang-Undang Tentang Dasar Pendidikan Nasional”, artikel dalam *Suara Masyumi*, thn ke V Nomor 3-4, Maret-April 1950.

Masyumi dan Konsepsi, Jakarta: Pimpinan Partai Masyumi bagian Penerangan, 1957.

Mimbar Demokrasi No: 85, Th. III, minggu III, Mei 1969.

M. Natsir, *Islam sebagai Landasan Negara*, Bandung: Pimpinan Fraksi Masyumi dalam Konstituante, 1957.

Naskah teks, *Risalah Sementara Sidang Konstituante*, Sidang ke-1 pada tanggal 6 Desember 1957.

Piagam Perjuangan Masumi (1952) bidang kenegaraan. Teks lengkap program ini dapat dilihat dalam *Suara Partai Masyumi*, tahun VIII Nomor 8-9, Agustus-September 1952.

Pidato Aidit, Sakirman dan Njoto di depan Majelis Konstituante dalam *Tentang Dasar Negara di Konstituante*, Bandung: Sekretariat Konstituante, Jilid I, 13-25, 1957.

Pidato Mr. Mohammad Roem, pada acara perpisahan siswa kelas V, Pesantren Persatuan Islam, yang dimuat dalam majalah *al-Muslimun*, tahun keenam.

Pidato Mr. Wilopo, Ketua Majelis Konstituante dalam pidato penutupan sidang Persiapan Konstitus Majelis Konstituante 18 Februari 1959.

Pidato Mr. Wongsonegoro dan Partai Indonesia Raya di depan Majelis Konstituante, dalam *Tentang Dasar Negara di Konstituante*, (Bandung: Sekretariat Konstituante RI, Jilid 1, 197-198 1957.

Pidato Oesman Raliby di depan Majelis Konstituante, dalam *Tentang Dasar Negara di Konstituante*, Jilid III, Jakarta: Kementerian Penerangan RI, 1959.

Pidato Presiden Soekarno, diberi judul “*Rex Publica, Sekali Lagi Rex Republica*“, dimuat di dalam *Risalah Persidangan Konstituante*, dalam Pleno Sidang I, Rapat 1, tahun 1959.

Pidato Sardjan, dapat dilihat dalam *Risalah Perundingan Dewan Perwakilan Rakyat*, Rapat ke-70, tanggal 22 Juli 1959.

Pidato Wilopo penutupan sidang Persiapan Konstitusi Majelis Konstituante, 18 Februari 1959.

Surat pernyataan sikap di kalangan pimpinan Masyumi kepada Presiden Soekarno ditandatangani pada tanggal 28 Juli 1959, dan tersimpan di dalam arsip Masyumi.

Surat pribadi M. Natsir kepada Kolonel Dahlan Djambek, Kolonel Ahmad Hussein, Kolonet Nusjirwan dan Kolonel Sju'ib, Pusat Perjuangan, 19 September 1960.

Tafsir Asas Masyumi, Teks lengkap dimuat di dalam *Pedoman Perjuangan Masyumi*, Jakarta: Pimpinan Partai Masyumi Bagian Penerangan, 1954.

Tentang pidato-pidato tanggapan dan wakil-wakil Masyumi ini, lihat S.U. Bayasut (ed), *Fakta Dokumen Kembali ke UUD 1945: Gagasan dan Tantangan*, 1966.

Undang-Undang Dasar 1945, Jakarta: Kementerian Penerangan, 1959.

Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia, pasal 3, 135-139, 1957.

Wawancara Yusriel Ihza Mahendra dengan Husen Umar, SH (Ketua Umum Pimpinan Pusat Dewan Dakwah Islam Indonesia, tanggal 5 Mei 2006.

Wawancara Yusril dengan Sjafruddin Prawiranegara, 5 Nopember 1988.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : A. Bachruddin
Tempat/Tgl. Lahir : Salatiga, 23 Desember 1953
N I P : 195312231982031005
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Utama Muda (IV/C)
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Alamat Rumah : Jl. Nyai Jinten NO. 316 E
Pengilon RT. 02/03 Mangunsari
Salatiga
No. Contact : 0816425571 / (0298) 327925
E-mail : achmadbahrudin@ymail.com
Alamat Kantor : Fakultas Ushluluddin, Adab dan
Humaniora IAIN Salatiga
Jl. Nakula Sadewa IV, No. 9
Kembang Arum Salatiga
Nama Ibu : Hj. Siti Khotijah (almh.)
Nama Ayah : H. Suyuti Abdullah (alm.)
Nama Istri : Tuti Cahyaningsih
Anak : 1. Awaluddin Zakky
2. Fariza Azmi

B. Riwayat Pendidikan

Tahun Lulus	Jenjang	Nama Perguruan	Jurusan/ Bidang Studi
1965	SD	SD. Negeri Salatiga	
1968	Madrasah Tsanawiyah	Madrasah Tsanawiyah NU Salatiga	
1971	SLTA	S.P.I.A.I.N Yogyakarta	
1978	S 1	IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	Fak. Syari'ah
2002	S 2	UMS Surakarta	Islamic Studies
-	S 3	UIN Sunan	Islamic

		Kalijaga Yogyakarta	Studies
--	--	------------------------	---------

C. Riwayat Pekerjaan

1. Kasi. Umum Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Salatiga tahun 1988.
2. Kasubag. Umum Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo tahun 1988-1990.
3. Kabag. T.U. Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo tahun 1990-1997
4. Kabag. Adminstrasi STAIN Salatiga 1997-2004.

D. Penghargaan

1. Satyalancana Karya Satya X tahun, dari Presiden Republik Indonesia
2. Satyalancana Karya Satya XX tahun, dari Presiden Republik Indonesia
3. Satyalancana Karya Satya XXX tahun, dari Presiden Republik Indonesia

E. Pengalaman Organisasi

Ketua Yayasan Ichyaul Islami (YAISLAMI) Kota Salatiga.

F. Pengalaman Luar Negeri

1. Studi Banding di Malaysia
2. Studi Banding di Singapura
3. Penelitian Lanjutan di India

G. Karya Ilmiah

1. Penelitian
 - a. Penelitian Lanjutan di India: Sejarah Pergolakan Politik Umat Islam di India. tahun 2013.
 - b. Penelitian Unggulan; Kepeloporan Ulama Masjid dalam Moderasi Islam, (Studi terhadap Takmir Masjid se-Kota Salatiga) tahun 2017.
2. Buku

Studi Komparasi Pemikiran Al-Mawardi dan Mohammad Natsir, tentang Negara, diterbitkan oleh STAIN SALATIGA Press, tahun 2003.

3. Artikel

- a. Konsep Negara dan Pembinaan Masyarakat Madani dalam Hukum Islam, *Asy-Syir'ah*, Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, No. 6, tahun 1999.
- b. Hubungan Negara dan Agama, Kajian Terhadap Pemikiran al-Mawardi, *Ijtihad*, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, Vol.9 No.1 Juni 2009.
- c. Implementasi Maqashid al-Syari'ah sebagai Solusi Problematika Sosial dan Kemasyarakatan Kontemporer, *Ijtihad*, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, Vol. 17, No.1, Juni, 2017.

Salatiga, Oktober 2018

Yang Membuat,

Drs. A. Bachruddin, M.Ag.

